BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.966, 2016 KEMENHUB. Angkutan Laut. penyelenggaraan dan pengusahaan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 74 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR PM 93 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN

DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Pelayanan Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2016, Menteri Perhubungan telah mendelegasikan kewenangan pemberian izin usaha perusahaan angkutan laut dan izin usaha angkutan laut khusus kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendelegasian guna percepatan pelayanan dalam pemberian perizinan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengubah beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan

www.peraturan.go.id

Laut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22

www.peraturan.go.id

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Pelayanan Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 22) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 403);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

www.peraturan.go.id

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 93 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
2. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
3. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.

www.peraturan.go.id

4. Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
5. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
6. Perusahaan Pelayaran-Rakyat adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang dalam melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional, dan/atau kapal motor dengan ukuran tertentu.
7. Pelayaran-Perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.
8. Penugasan adalah penyelenggaraan kegiatan angkutan laut yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan biaya yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebesar selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.
9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak

www.peraturan.go.id

berpindah-pindah.

10. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.
11. Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
12. Perusahaan Nasional Keagenan Kapal adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk kegiatan keagenan kapal.
13. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
14. Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia.
15. Sub Agen adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal di pelabuhan atau terminal khusus tertentu yang ditunjuk oleh agen umum.
16. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
17. Trayek Tetap dan Teratur (*Liner*) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
18. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (*Tramper*) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
19. Deviasi adalah penyimpangan trayek atau tidak

www.peraturan.go.id

menyinggahi pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayek.

20. Omisi adalah meninggalkan atau tidak menyinggahi pelabuhan wajib singgah yang ditetapkan dalam jaringan trayek.
21. Substitusi adalah penggantian kapal pada trayek tetap dan teratur yang telah ditetapkan sebelumnya.
22. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
23. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
24. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
25. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul,

www.peraturan.go.id

dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

26. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
27. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
28. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
29. Perwakilan Perusahaan Angkutan Laut Asing (*Owner's Representative*) adalah badan usaha atau perorangan warga negara Indonesia atau perorangan warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing di luar negeri untuk mewakili kepentingan administrasinya di Indonesia.
30. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar negeri.
31. Kegiatan Bongkar Muat adalah kegiatan yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring, cargodoring,* dan *receiving/delivery*.
32. *Stevedoring* adalah pekerjaan membongkar barang

www.peraturan.go.id

dari kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat.

33. *Cargodoring* adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-jala (*ex tackle*) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan barang atau sebaliknya.
34. *Receiving/Delivery* adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.
35. Izin Operasi adalah izin yang diberikan kepada pelaksana kegiatan angkutan laut khusus berkaitan dengan pengoperasian kapalnya guna menunjang usaha pokoknya.
36. Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia adalah orang perorangan (pribadi) yang memenuhi persyaratan untuk berusaha di bidang angkutan laut pelayaran-rakyat.
37. Tarif Pelayanan Kelas Non-Ekonomi adalah tarif pelayanan angkutan yang berorientasi kepada kelangsungan dan pengembangan usaha angkutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta perluasan jaringan pelayanan angkutan laut.
38. Keseimbangan Permintaan dan Tersedianya Ruangan adalah terwujudnya pelayanan pada suatu trayek yang dapat diukur dengan tingkat faktor muat (*load factor*) tertentu.
39. Kontrak Jangka Panjang adalah paling sedikit untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar perusahaan angkutan laut yang menyelenggarakan pelayaran-perintis dapat melakukan peremajaan kapal.

www.peraturan.go.id

40. Dokumen Muatan adalah konosemen atau *bill of lading* dan *manifest*.
41. *Stuffing* Peti Kemas adalah pekerjaan memuat barang dari tempat yang ditentukan ke dalam peti kemas.
42. *Stripping* Peti Kemas adalah pekerjaan membongkar barang dari dalam peti kemas sampai dengan menyusun di tempat yang ditentukan.
43. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.
44. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
45. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
46. Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara/swasta dan/atau koperasi.
47. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
48. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
49. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
50. Gubernur adalah kepala daerah untuk provinsi.
51. Bupati atau Walikota adalah kepala daerah untuk kabupaten atau kota.

2. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

www.peraturan.go.id

Pasal 71

(1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan laut, badan usaha mengajukan permohonan kepada:
   a. Kepala BKPM bagi perusahaan yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional;
   b. gubernur bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah propinsi setempat; atau
   c. bupati atau walikota bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat.

(2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Kepala BKPM dengan menggunakan format Contoh 51, gubernur dengan menggunakan format Contoh 51a, dan bupati/walikota dengan menggunakan format Contoh 51b dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini disertai dengan dokumen persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3).

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKPM sesuai kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, Kepala BKPM mengembalikan permohonan secara tertulis

www.peraturan.go.id

kepada pemohon dengan menggunakan format Contoh 51c dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk melengkapi persyaratan.

(6) Dalam hal persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, gubernur, atau bupati/walikota mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon dengan menggunakan format Contoh 51d dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini untuk melengkapi persyaratan.

(7) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat diajukan kembali oleh pemohon kepada Kepala BKPM, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, setelah persyaratan dilengkapi.

(8) Permohonan yang diajukan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus dibuat sebagai permohonan baru.

(9) Kepala BKPM setelah melakukan penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan evaluasi dan penelitian dari aspek teknis.

(10) Dalam melakukan evaluasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota dapat melakukan verifikasi status hukum kapal tempat kapal didaftarkan.

(11) Dalam hal hasil evaluasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan dokumen permohonan kepada Kepala BKPM untuk dilengkapi oleh pemohon.

www.peraturan.go.id

(12) Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi izin usaha angkutan laut kepada Kepala BKPM dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, dengan menggunakan format Contoh 52 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(13) Berdasarkan rekomendasi izin usaha angkutan laut yang disampaikan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Kepala BKPM dengan tembusan Direktur Jenderal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dengan menggunakan format Contoh 53, Contoh 53a, dan Contoh 53b, dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

(1) Perusahaan angkutan laut nasional yang telah mendapatkan izin usaha dari Kepala BKPM, gubernur, atau bupati/walikota, wajib:
   a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut;
   b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan;
   c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

www.peraturan.go.id

d. menyediakan fasilitas untuk angkutan pos;
e. melaporkan secara tertulis kepada Kepala BKPM, gubernur dan/atau walikota/bupati sesuai kewenangannya apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab, dan/atau nama pemilik, Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 7 (tujuh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;
f. memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut;
g. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin usaha angkutan laut dengan tembusan Direktur Jenderal, semua data kapal milik dan/atau kapal *charter* serta kapal yang dioperasikan;
h. melengkapi semua kapal yang dimiliki dengan spesifikasi kapal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL); dan
i. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut.

4. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Pemegang izin perusahaan angkutan laut dalam melakukan kegiatan usahanya, wajib menyampaikan laporan:

a. perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Kepala BKPM dengan tembusan

www.peraturan.go.id

Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;

b. kinerja keuangan perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Kepala BKPM dengan tembusan Direktur Jenderal, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya;

c. rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal serta laporan daftar muatan di atas kapal (*cargo manifest*) kepada Penyelenggara Pelabuhan;

d. bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Penyelenggara Pelabuhan paling lama 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal dengan menggunakan format Contoh 4 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

e. realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) kepada Kepala BKPM dengan tembusan Direktur Jenderal, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur atau *liner* selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari sejak kapal tersebut menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (*round voyage*), sedangkan bagi kapal-kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper pada setiap 1 (satu) bulan menggunakan format Contoh 5a dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

f. perubahan armada kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala BKPM, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya; dan

g. tahunan kegiatan perusahaan kepada Kepala BKPM dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, paling lama tanggal 28 Februari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (*voyage*

www.peraturan.go.id

report) dengan menggunakan format Contoh 5a, Contoh 5b, Contoh 5c, Contoh 5d, Contoh 5e dan Contoh 5f dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

(1) Perusahaan angkutan laut nasional dengan kepemilikan modal 100% (seratus persen) dalam negeri yang berubah statusnya menjadi perusahaan angkutan laut nasional dengan penanaman modal asing (*joint venture*) wajib melaporkan perubahan statusnya tersebut kepada Kepala BKPM dengan tembusan Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota.

(2) Laporan perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
   a. administrasi; dan
   b. teknis.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. salinan akta perusahaan dan perubahannya;
   b. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan; dan
   c. salinan Izin Penanaman Modal Asing di bidang usaha angkutan laut dari instansi yang berwenang.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut berukuran minimal GT 5.000 (lima ribu *Gross Tonnage*) yang dibuktikan dengan:
   a. *grosse* akta kapal asli;
   b. surat ukur kapal yang masih berlaku; dan

www.peraturan.go.id

c. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku.

(5) Batasan kepemilikan modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

6. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Perusahaan angkutan laut patungan (*joint venture*) yang berubah statusnya menjadi perusahaan angkutan laut terbuka (Tbk), wajib melaporkan perubahan statusnya kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala BKPM, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

7. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala BKPM, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mencatat dan menerbitkan keterangan perubahan status perusahaan angkutan laut patungan (*joint venture*) terbuka (Tbk) dengan menggunakan format Contoh 56 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

8. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan laut khusus pelaksana kegiatan angkutan laut khusus wajib memiliki izin operasi yang diberikan oleh Kepala BKPM

www.peraturan.go.id

9. Ketentuan ayat (5) Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

(1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diberikan setelah memenuhi persyaratan:
   a. administrasi; dan
   b. teknis.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. memiliki izin usaha atau keterangan terdaftar dari instansi pembina usaha pokoknya disertai salinan akta pendirian perusahaan yang dilampiri surat keputusan pengesahan akta pendirian perseroan dari instansi yang berwenang;
   b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
   c. memiliki penanggung jawab yang merupakan pemimpin tertinggi perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau perjanjian sewa;
   e. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, *nautis*, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; dan
   f. memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (*bussines plan*).

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

www.peraturan.go.id

a. memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran dan tipe kapal disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya; dan
b. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan dan/atau nautika dan/atau teknika pelayaran niaga.

(4) Kapal berbendera Indonesia yang laik laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dapat dibuktikan dengan melampirkan:
a. *grosse* akta kapal;
b. surat ukur kapal yang masih berlaku;
c. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan
d. sertifikat klasifikasi.

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pelaksana kegiatan angkutan laut khusus masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Direktur Jenderal dan hasilnya disampaikan kepada Kepala BKPM.

10. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

(1) Untuk memperoleh izin operasi angkutan laut khusus, badan usaha kegiatan angkutan laut khusus harus mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3) dengan menggunakan format Contoh 65 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.peraturan.go.id

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKPM melakukan penelitian atas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Kepala BKPM mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon dengan menggunakan format Contoh 65a dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini untuk melengkapi persyaratan.

(4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali oleh pemohon kepada Kepala BKPM, setelah persyaratan dilengkapi.

(5) Permohonan yang diajukan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus dibuat sebagai permohonan baru.

(6) Kepala BKPM setelah melakukan penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan evaluasi dan penelitian dari aspek teknis.

(7) Dalam melakukan evaluasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi status hukum kapal tempat kapal didaftarkan.

(8) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan dokumen permohonan kepada Kepala BKPM untuk dilengkapi oleh pemohon.

(9) Berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan

www.peraturan.go.id

rekomendasi izin operasi angkutan laut khusus kepada Kepala BKPM dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja dengan menggunakan format Contoh 66 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(10) Kepala BKPM setelah menerima rekomendasi dari Direktur Jenderal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja, menerbitkan Surat Izin Operasi Angkutan Laut Khusus dengan menggunakan format Contoh 67 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

11. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

(1) Penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus yang telah mendapatkan izin operasi, wajib:
   a. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin operasi angkutan laut khusus diterbitkan;
   b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
   c. memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau siswa yang melaksanakan praktek kerja laut;
   d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin dengan tembusan Direktur Jenderal;
   e. melaporkan secara tertulis pengoperasian kapal milik dan/atau kapal *charter* setiap 3 (tiga) bulan kepada pejabat pemberi izin dengan tembusan Direktur Jenderal;
   f. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik,

www.peraturan.go.id

nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan domisili perusahaan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala BKPM;

g. melaporkan setiap terjadi penambahan atau pengurangan kapal yang dimiliki atau dioperasikan dan mendaftarkan untuk mendapatkan spesifikasi kapal kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala BKPM; dan

h. melaporkan secara tertulis realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) kepada Kepala BKPM dengan tembusan Direktur Jenderal.

(2) Laporan perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan domisili perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, harus disertai dengan salinan:

a. Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS);

b. akte perubahan perseroan, apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik;

c. Kartu Tanda Penduduk direktur utama atau penanggung jawab, apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik;

d. nomor pokok wajib pajak perusahaan, apabila terjadi perubahan nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan; dan

e. surat keterangan domisili perusahaan, apabila terjadi perubahan domisili perusahaan.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan domisili perusahaan yang merupakan bagian yang tidak

www.peraturan.go.id

terpisahkan dari Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) dengan tembusan Kepala BKPM.

12. Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 74 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 93 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT

Contoh 1

Nomor : .....1), ...2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri

Kepada
Yth. ..... 3)
Jl. ..... 4)
di
.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ....., bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal dengan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal : .....6)
   b. Nomor Pendaftaran : .....7)
   c. Tipe : .....8)
   d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : .....9)
   e. Tenaga Penggerak (HP) : .....10)
   f. Kapasitas Angkut : .....11)
   g. Status Kepemilikan Kapal : milik / sewa *)
   h. Kode Trayek : .....12)
   i. Pelabuhan Pangkal : .....13)
   j. Route Trayek : .....14)
   k. Urgensi : .....15)
   l. Nomor dan Tanggal SIUPAL : .....16)
   m. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal : .....17)
   n. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya : .....18)

   Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut:
   a. Salinan SIUPAL;
   b. Salinan Spesifikasi Teknis Kapal;
   c. Salinan Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal yang terakhir;
   d. Rencana jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal;
   e. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
   f. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya.

2. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ..... s/d tanggal .....19)

3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. .....20)

.....21)

Tembusan :
Ketua Umum DPP INSA

*) Coret yang tidak perlu

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 1

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut/ gubernur/bupati/walikota)
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
6)	Diisi dengan nama kapal
7)	Diisi dengan nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan grosse tonage dan *dead weight tonage*
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan *Horse Power* (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan kode trayek yang telah ditetapkan
13)	Diisi dengan pelabuhan pangkal (*home base*)
14)	Diisi dengan urutan trayek disertai dengan jarak mil antar pelabuhan
15)	Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL perusahaan yang bersangkutan
17)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
18)	Diisi dengan nomor dan tanggal penempatan pengoperasian kapal periode sebelumnya
19)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
20)	Diisi dengan nama perusahaan
21)	Diisi dengan nama direktur utama atau penanggung jawab perusahaan

www.peraturan.go.id

Contoh 2

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri

.....1), ... 2)

Kepada

Yth. Direktur Utama PT. .... 3)
Jl ..... 4)

di

.....5)

1. Sesuai ketentuan Pasal.... dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ……., dan menunjuk surat Saudara ..... Nomor ..... tanggal ..... perihal Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.

2. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal Saudara telah dicatat sebagai armada niaga nasional dan dioperasikan pada trayek tetap dan teratur dengan data kapal sebagai berikut:

a.	Nama Kapal	:	……6)
b.	Nomor Pendaftaran	:	……7)
c.	Tipe	:	……8)
d.	Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT)	:	……9)
e.	Tenaga Penggerak (HP)	:	……10)
f.	Kapasitas Angkut	:	……11)
g.	StatusKepemilikan Kapal	:	milik / sewa*)
h.	Kode Trayek	:	……12)
i.	Pelabuhan Pangkal	:	……13)
j.	Route Trayek	:	……14)
k.	Urgensi	:	……15)
l.	Nomor dan Tanggal SIUPAL	:	……16)
m.	Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal	:	……17)
n.	Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya	:	……18)

3. Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur ini berlaku dari tanggal ..... sampai dengan tanggal ……19) dan apabila kapal yang dioperasikan tidak menyinggahi Pelabuhan ..... secara tetap dan teratur dengan berjadual, maka akan diperlakukan sebagai kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur, disamping itu saudara wajib memperhatikan:
   a. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim serta peraturan perundang-undangan lainnya;
   b. Laporan realisasi perjalanan kapal (*voyage report*) per triwulan;
   c. Kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

4. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 20)

……. 21)

..... 22)

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat.

*) Coret yang tidak perlu

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 2

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional
6)	Diisi dengan nama kapal
7)	Diisi dengan nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan *Horse power* (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan kode trayek yang telah ditetapkan
13)	Diisi dengan pelabuhan pangkal (*home base*)
14)	Diisi dengan urutan pelabuhan yang disinggahi disertai dengan jarak mil antarpelabuhan
15)	Diisi dengan jenis muatan/penumpang
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL perusahaan yang bersangkutan
17)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
18)	Diisi dengan nomor dan tanggal berlakunya penempatan pengoperasian kapal periode sebelumnya
19)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
20)	Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
21)	Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
22)	Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin

www.peraturan.go.id

Contoh 3a

LAPORAN KEDATANGAN KAPAL

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK)

.....1), ...2)

Kepada
Yth. ..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ....., dengan ini diberitahukan bahwa akan tiba di Pelabuhan ..... Kapal Milik/*Charter*/Keagenan *) sebagai berikut :

1. Nama Kapal/*Voyage* : .....6)
2. Bendera/*IMO Number* : .....7)
3. DWT/GT : .....8)
4. Draft : .....9)
5. LOA : .....10)
6. Pemilik / Principle : .....11)
7. Nama Agen : .....12)
8. Nama Nakhoda : .....13)
9. Trayek : Tetap dan Teratur / Tidak Tetap dan Tidak Teratur*)
10. Jenis Pelayaran : SIUPAL / SIOPSUS / SIUPER *)
11. ETA/ETD : .....14)
12. Pelabuhan Asal/Tujuan : Dari ..... Tujuan .....15)
13. Posisi Kapal Sekarang : .....16)
14. Tambat/Labuh yang diminta : Sesuai dengan kondisi masing-masing Pelabuhan *)
15. Jenis barang yang akan di :
    a. Bongkar : 1) Non Kontainer : Barang Umum (GC) / Curah Kering/Cair *)
    2) Kontainer : Isi 20" / 40" ..... Boxes .....
    Kosong 20" / 40" ..... Boxes .....
    b. Muat : 1) Non Kontainer : Barang Umum (GC) / Curah Kering/Cair *)
    2) Kontainer : Isi 20" / 40" ..... Boxes .....
    Kosong 20" / 40" ..... Boxes .....
16. PBM yang ditunjuk : .....17)
17. Rencana Kerja Bongkar Muat : .....18)
18. Jenis Barang (sesuai *manifest*) : ..... 19)

Uraian		Bongkar		Muat	
a.	General Cargo (brg. Campuran)	.....	T/M3	.....	T/M3
b.	Bag. Cargo (brg. Karungan)	.....	T/M3	.....	T/M3
c.	Bulk Cargo (brg curah)	.....	T/M3	.....	T/M3
d.	Liquid cargo (brg cair)	.....	T/M3	.....	T/M3
e.	Barang berbahaya	.....	T/M3	.....	T/M3
f.	Lain-lain	.....	T/M3	.....	T/M3
g.	Jumlah	.....	T/M3	.....	T/M3
h.	Penumpang naik/turun	.....	Org	.....	Org
	Hewan turun	.....	Ekor	.....	Ekor

Diisi .....20) No. ...../...../...../Lala/.....21)

Mengetahui,

A.n ..... 22)

..... 23)

Perusahaan Pelayaran

..... 24)
Pimpinan

Tembusan :
1. Kabid Lala & Kepelabuhanan;
2. Kabid Gamat;
3. BUP setempat.

*) Coret yang tidak perlu

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 3a

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor perusahaan angkutan laut nasional
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama kepala kantor penyelenggara pelabuhan OP/Syahbandar (KSOP)/UPP/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie Lala
4)	Diisi dengan alamat kantor OP/Syahbandar (KSOP)/UPP/Kanpel Batam C.q Bidang Lala/Kasie Lala
5)	Diisi dengan nama kota kantor OP/Syahbandar(KSOP)/UPP/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie Lala
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan bendera asal kapal tersebut dan *IMONumber*
8)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
9)	Diisi dengan draft maksimal kapal
10)	Diisi dengan panjang kapal
11)	Diisi dengan nama pemilik/principle kapal
12)	Diisi dengan nama agen
13)	Diisi dengan nama nahkoda
14)	Diisi dengan perkiraan waktu kedatangan kapal di pelabuhan asal dan waktu keberangkatan ke pelabuhan tujuan
15)	Diisi dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan
16)	Diisi denganposisi kapal labuh dengan mencantumkan titik koordinat
17)	Diisi dengannama PBM yang ditunjuk dalam pelaksanaan bongkar muat
18)	Diisi denganrencana kerja bongkar muat
19)	Diisi dengan data yang sesuai dengan daftar di manifest
20)	Diisi dengan OP/Syahbandar/KSOP/UPP/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie Lala
21)	Diisi dengan nomor surat UPT yang bersangkutan
22)	Diisi dengan nama jabatan pejabat UPT yang bersangkutan
23)	Diisi dengan nama pejabat UPT yang bersangkutan
24)	Diisi dengan nama pimpinan perusahaan

www.peraturan.go.id

Contoh 3b

LAPORAN KEBERANGKATAN KAPAL

Nomor : .....1), ...2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Penyampaian Laporan Rencana Keberangkatan Kapal

Kepada
Yth. ..... 3)
Jl. ..... 4)

di
.....5)

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum:
   a. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011;
   c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun .....

2. Berdasarkan butir 1 (satu) di atas, bersama ini kami laporkan rencana keberangkatan kapal dengan data sebagai berikut:

a.	Nama Kapal/*Voyage*	:	....6)
b.	Bendera/*IMO Number*	:	....7)
c.	Pemilik/*Principal/Owner*	:	....8)
d.	Keagenan	:	....9)
e.	Alamat/telp/Fax	:	....10)
f.	Status Kapal	:	....11)
g.	Type Kapal	:	....12)
h.	Jenis Pelayaran	:	....13)
i.	Jenis Trayek	:	....14)
j.	DWT / GT	:	....15)
k.	Panjang Kapal/LOA	:	....16)
l.	Draft Depan/Belakang	:	....17)
m.	Pelabuan Tujuan (ETD)	:	....18)
n.	Jumlah Penumpang (N/T/L)	:	....19)
o.	Jenis/Jumlah Muatan/Ton/Box	:	....20)

3. Demikian laporan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Diisi oleh .....21) No. ...../...../...../Lala/.....22)

Mengetahui,

A.n .....22)

.....23)

Perusahaan Pelayaran

.....24)
Pimpinan

Tembusan :
1. Kabid/Kasi/Petugas Lala & Kepelabuhanan;
2. Kabid/Kasi/Petugas Kesyahbandaran;
3. .....25)

*) Coret yang tidak perlu

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 3b

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor perusahaan angkutan laut nasional
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan nama kepala kantor penyelenggara pelabuhan (OP/Syahbandar (KSOP)/Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP)/Kantor Pelabuhan Batam C.q Bidang Lala/Kasie Lala
4)	Diisi dengan alamat kantor penyelenggara pelabuhan (OP/Syahbandar (KSOP)/Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP)/Kanpel Batam C.q Bidang Lala/Kasie Lala
5)	Diisi dengan nama kota kantor penyelenggara pelabuhan (OP/Syahbandar (KSOP)/Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP)/Kanpel Batam C.q Bidang Lala/Kasie Lala
6)	Diisi dengan nama kapal
7)	Diisi dengan bendera asal kapal tersebut dan *IMO Number*
8)	Diisi dengan nama pemilik/principle kapal
9)	Diisi dengan nama agen
10)	Diisi dengan alamat /telp/fax perusahaan
11)	Diisi dengan status kapal milik/sewa/*charter*
12)	Diisi dengan tipe kapal
13)	Diisi dengan jenis pelayaran
14)	Diisi dengan trayek
15)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
16)	Diisi dengan panjang kapal
17)	Diisi dengan *draft* maksimal kapal
18)	Diisi denganwaktu keberangkatan menuju pelabuhan tujuan
19)	Diisi dengan jumlah penumpang (N/T/L)
20)	Diisi denganjenis/jumlah muatan/ton/box
21)	Diisi dengan OP/syahbandar/KSOP/UPP/Kanpel Batam C.q Bidang Lala/Kasie Lala
22)	Diisi dengan Nomor surat UPT yang bersangkutan
23)	Diisi dengan nama jabatan pejabat UPT yang bersangkutan
24)	Diisi dengan nama pejabat UPT yang bersangkutan
25)	Diisi dengan BUP setempat

www.peraturan.go.id

Contoh 3c

LAPORAN KEDATANGAN/KEBERANGKATAN KAPAL

Nama : .....1)
Ukuran : .....2)
Nama Nakhoda : .....3)

.....4)

NO.	KEDATANGAN *)		BERANGKAT *)	
1.	Dari :		Tujuan :	
2.	Tanggal :		Tanggal :	
3.	Bongkar		Muat	
	a. Jenis Barang :		a. Jenis Barang :	
	b. Jumlah (T/m) :		b. Jumlah (T/m) :	
4.	Turun		Naik	
	a. Penumpang :		a. Penumpang :	
	b. Hewan :		b. Hewan :	
5.	Keterangan :		Keterangan :	

.....5), ...6)
(PT./Nakhoda KM. ..... 7)

(.....8))

*) Data rinci terlampir dalam *manifest*

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 3c

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan nama kapal
2)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
3)	Diisi dengan nama nahkoda kapal
4)	Diisi dengan data yang sesuai dengan daftar di manifest
5)	Diisi dengan daerah pelabuhan tempat keberangkatan kapal
6)	Diisi dengan tanggal berangkat kapal menuju pelabuhan tujuan
7)	Diisi dengan nama kapal
8)	Diisi dengan nama nahkoda kapal

www.peraturan.go.id

Contoh 4

LAPORAN BULANAN KEGIATAN KUNJUNGAN KAPAL

DI PELABUHAN .....

PT. PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT NASIONAL / PT. PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT KHUSUS (PUSAT/CABANG) *)
JALAN : .....
NOMOR TELEPON : .....

BULAN : .....

NO	NAMA KAPAL	DATANG		BONGKAR TON/M3	JENIS BARANG	BERANGKAT		MUAT TON/M3	JENIS BARANG	STATUS TRAYEK(*)	STATUS KAPAL(M/C/K)*)
		TGL	DARI PELAB.			TGL	KE PELAB.				

..... tanggal .....

PT. PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT NASIONAL /
PT. PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT KHUSUS *)

Keterangan :
L : Liner
T : Tramper
M : Milik
C : Charter
K : Keagenan

.....

Kepala

*) Coret yang tidak perlu

Contoh 5a

LAPORAN REALISASI PERJALANAN KAPAL (*VOYAGE REPORT*)

Nama Perusahaan Pelayaran/Non Pelayaran *) : PT.
Alamat Perusahaan :
Telepon :
Periode Laporan :
Status Trayek : Liner/Tramper *)

Nama Kapal :
Bendera /Status Kapal :
Type/Ukuran Kapal :
Kecepatan Ekonomis :

Pelabuhan Asal	Tiba		Berangkat		Jarak Mil	Waktu Berlayar		Waktu Berlabuh		Bongkar Muat		Waktu Yang di Perlukan	Pelabuhan Tujuan	Pemuatan/Pemberangkatan						
	Tgl	Jam	Tgl	Jam		Hari	Jam	Hari	Jam	Mulai	Selesai			B/M	Ton 1000 Kg	Ukuran (M3)	Penumpang	Hewan	Jenis Barang	Kemasan
1	2	3	4	5	6	7	8	s 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

CATATAN :
Keterlambatan *handling* oleh karena muatan, menunggu tongkang/truck, kerusakan kapal dsd.
Diperlukan : ..... karena .....
Dilaut (karena cuaca, kerusakan mesin dsb) .....

..... , ...20 ...

PT. .....

.....

www.peraturan.go.id

I. DAFTAR JENIS MUATAN

1.	Beras	17.	Minyak Goreng	32.	Barang Kerajinan	48.	Kaolin	64.	Ikan Asia
2.	Gula Pasir	18.	Sayur-sayuran	33.	Soda ash	49.	Nikel	65.	Rumput Laut
3.	Gandum	19.	Buah-buahan	34.	Zat asam	50.	Alumunium	66.	Hasil Laut Lainnya
4.	Tepung Terigu	20.	Kapas	35.	Mesin-mesin	51.	Batubara	67.	Sapi
5.	Kedelai	21.	Hasil Pertanian dan	36.	Makanan Ternak	52.	Pasir Kwarsa	68.	Kerbau
6.	Kacang-kacangan		Perkebunan lainnya	37.	Baja/Besi Beton	53.	Pasir Besi	69.	Kulit Hewan
7.	Lada	22.	Pupuk	38.	Kertas	54.	Pasir Lain	70.	Kulit Ternak Lainnya
8.	Cengkeh	23.	Semen	39.	Makanan/Minuman	55.	Klinker	71.	Penumpang Umum
9.	Rempah-rempah	24.	Garmen	40.	Hasil Perindustrian lainnya	56.	Hasil Pertambangan	72.	Transmigrasi
10.	Kopi	25.	Tekstil	41.	Crude Oil	57.	Logos	73.	Turis
11.	Tembakau	26.	Elektronik	42.	Bahan Bakar Minyak	58.	Kayu Gergaji	74.	TKI
12.	Kakao	27.	Gaplek	43.	Gas/LNG	59.	Kayu Lapis	75.	Lain-lain
13.	Teh	28.	Kedaraan	44.	Aspal	60.	Rotan		
14.	Karet	29.	Furniture	45.	Timah	61.	Hasil Hutan Lainnya		
15.	Kopra	30.	Garam	46.	Bauksit	62.	Ikan		
16.	Minyak Sawit	31.	Bahan Kimia	47.	Tembaga	63.	Udang		

II. DAFTAR JENIS KEMASAN

1. Bag. (pak/karung)	5. Drum	9. *Dry Bulk*
2. *Case* (Peti)	6. *Pallet*	10. *Liquid Bulk*
3. *Bale* (bal/bundal)	7. Petikemas	11. lain-lain
4. Barel (Kaleng)	8. *Barge*	

III. DAFTAR TYPE KAPAL

1. Konvensional	5. Tongkang	9. *Bulk* (curah)	13.Kapal Layar(1)
2. *Container* (Petikemas)	6. Roro	10. Tanker	14.Kapal layar Motor(1)
3. Semi *Container* (Petikemas)	7. Tunda	11.	15.Kapal Motor (1)
4. *Landing Craft*	8. Penumpang	12. Ikan	16.Lain-lain

www.peraturan.go.id

Contoh 5b

LAPORAN TAHUNAN SIUPAL / SIOPSUS *)
TAHUN .....

Nomor : ..... 1),..... 2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Tahunan Tahun ..... 3)

Kepada

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut/
Kepala BKPM *)

di

JAKARTA

1. Menunjuk ketentuan Pasal .... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ..... Tahun ....., dengan ini disampaikan Laporan Tahunan untuk tahun ....., dan terlampir disampaikan Data Umum Perusahaan.

2. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 4)

.....5)
..... 6)

Tembusan :
Ketua Umum DPP INSA

*) coret yang tidak perlu/ sesuai dengan sifat pengusahaannya

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 5b

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili perusahaan
2)	Diisi dengan tanggal dibuatnya laporan
3)	Diisi dengan tahun yang akan dilaporkan
4)	Diisi dengan nama perusahaan
5)	Diisi dengan nama pimpinan perusahaan
6)	Diisi dengan nama jabatan pimpinan perusahaan

www.peraturan.go.id

Contoh 5c

DATA UMUM PERUSAHAAN
Posisi : 31 Desember ....

1.	Nama perusahaan Angkutan Laut / Angkutan Laut Khusus	:	.....1)
2.	Akte Pendirian Perusahaan Nomor	:	.....2)
	- Notaris	:	.....3)
	- Nomor dan tanggal	:	.....4)
3.	Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS*)	:	.....5)
4.	Alamat perusahaan	:	.....6)
	Nomor telepon	:	.....7)
	Domisili	:	.....8)
5.	Nama / DIRUT	:	.....9)
	Alamat Rumah	:	.....10)
	Nomor Telepon	:	.....11)
6.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan	:	.....12)
7.	Jumlah Tenaga Kerja	:	.....13) Orang
	a. Darat :		
	- Pusat	:	.....14) Orang
	- Cabang	:	.....15) Orang
	b. Laut	:	.....16) Orang
8.	Jumlah Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut/ Angkutan Laut Khusus Alat kantor cabang terlampir	:	.....17) Buah
9.	Keangotaan INSA (Nomor- Tanggal)	:	.....18)
10.	Jumlah kapal yang dimiliki	:	.....19) Unit
	Jumlah Taruna/Siswa Praktek PRODA / PKL **)	:	....20) Orang
	Jumlah kapal yang dioperasikan	:	.....21) Unit

..... 22)

PT. .....1)

(.....23))
Direktur Utama

*) Sesuai dengan sifat pengusahaannya.
**) Bagi kapal yang berukuran diatas GT. 750

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 5c

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan nama perusahaan
2)	Diisi dengan nomo akte pendirian perusahaan
3)	Diisi dengan nama notaries pada akte pendirian perusahaan
4)	Diisi dengan nomor dan tanggal akte pendirian perusahaan
5)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
6)	Diisi dengan alamat perusahaan
7)	Diisi dengan nomor telepon perusahaan
8)	Diisi dengan domisili perusahaan
9)	Diisi dengan nama Dirut perusahaan
10)	Diisi dengan alamat rumah Dirut perusahaan
11)	Diisi dengan nomor telepon rumah
12)	Diisi dengan NPWP perusahaan
13)	Diisi dengan jumlah tenaga kerja
14)	Diisi dengan jumlah tenaga kerja di pusat
15)	Diisi dengan jumlah tenaga kerja di cabang
16)	Diisi dengan jumlah tenaga kerja di laut
17)	Diisi dengan jumlah cabang
18)	Diisi dengan nomor dan tanggal keanggotaan INSA
19)	Diisi dengan jum;ah kapal yang dimiliki
20)	Diisi dengan jumlah taruna/siswa praktek
21)	Diisi dengan jumlah kapal yang dioperasikan
22)	Diisi dengan tanggal surat
23)	Diisi dengan nama Dirut perusahaan

www.peraturan.go.id

Contoh 5d

DATA ARMADA YANG DIMILIKI
PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT/ ANGKUTAN LAUT KHUSUS*)
PT. ……
POSISI : ……

NO.	NAMA KAPAL	TYPE	TMPT DAN TAHUN PEMBUATAN	UKURAN			KAPASITAS ANGKUT					BENDERA	CALL SIGN	KONS TRUK SI	DIKLAS KAN PADA	KONSUMSI BBM/HARI		JENIS BBM	KECE PATAN	KET.
				DWT	GT	HP	M3	TON	TEUS	ORANG	EKOR					DI LAUT	DIPELA BUHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

……, ……

DIREKTUR UTAMA

(……)

*) Sesuai dengan sifat pengusahaannya

Contoh 5e

DATA KEGIATAN OPERASIONAL
KAPAL MILIK, CHARTER, DIOPERASIKAN
PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT / ANGKUTAN LAUT KHUSUS*)
PT. ……
POSISI : ……

NO.	NAMA KAPAL	POLA OPERASI				HARI OPERASI TAHUN		HARI DOCK PER TAHUN	JARAK TEMPUH PER TAHUN	JUMLAH VOYAGE PER TAHUN	JUMLAH BONGKAR MUAT				JUMLAH LINE YANG DILAYARI PER TAHUN
		LINER		TRAMPER							ANTAR PULAU	EKSPOR	IMPOR	JUMLAH	
		DN	LN	DN	LN	DI LAUT	DI PELABUHAN								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

……, ……

DIREKTUR UTAMA

(……)

*) Sesuai dengan sifat pengusahaannya.

www.peraturan.go.id

Contoh 5f

DATA KEGIATAN OPERASIONAL
KAPAL KEAGENAN PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT / ANGKUTAN LAUT KHUSUS*)
PT. ……
POSISI : ……

NO.	ANTAR PULAU (DALAM NEGERI)								LUAR NEGERI						
	NAMA KAPAL	UKURAN (DWT/GT)	BONGKAR/TURUN			MUAT / NAIK			NAMA KAPAL	UKURAN (DWT/GT)	IMPOR			EKSPOR	
			GENCAR (T/M3)	PENUMPANG (ORG)	HEWAN (EKOR)	GENCAR (T/M3)	PENUMPANG (ORG)	HEWAN (EKOR)			GENCAR (T/M3)	PENUMPANG (ORG)	HEWAN (EKOR)	GENCAR (T/M3)	PENUMPANG (ORG)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

……, ……

DIREKTUR UTAMA

(……)

*) *Sesuai dengan sifat pengusahaannya.*

www.peraturan.go.id

Contoh 6

Nomor : .....1), ...2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Deviasi Kapal.....
Terhadap Trayek Tetap dan Teratur

Kepada
Yth. ..... 3)
Jl. ..... 4)

di
.....5)

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ..... dan surat Laporan Rencana Pengoperasian Kapal .....7) Nomor..... Tanggal..... sebagaimana terlampir, kami sampaikan surat..... 12) Nomor ..... 13) tanggal ..... 14) perihal Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.

2. Sehubungan dengan ..... 6), maka kapal KM. ..... 7) yang kami operasikan pada trayek ..... 8), setelah tiba di Pelabuhan ..... 9) akan melakukan deviasi ke Pelabuhan ..... 10).

3. Deviasi tersebut akan dilakukan pada tanggal ..... 11).

4. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. (.....15))
An. Penanggung Jawab

(.....16))

Tembusan :
Ketua Umum DPP INSA

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 6

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut/gubernur/bupati/walikota)
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
6)	Diisi dengan penyebab kapal melakukan deviasi (misalnya dalam rangka mengangkut muatan tertentu dalam jumlah tertentu)
7)	Diisi dengan nama kapal
8)	Diisi dengan trayek tetap dari kapal tersebut
9)	Diisi dengan nama pelabuhan terakhir sebelum kapal deviasi
10)	Diisi dengan nama pelabuhan tujuan deviasi
11)	Diisi dengan tanggal deviasinya
12)	Diisi dengan nomenklatur jabatan yang diberi kewenangan untuk menandatangani (Direktur Jenderal Perhubungan Laut/gubernur/bupati/walikota)
13)	Diisi dengan nomor surat dimaksud pada angka 12)
14)	Diisi dengan tanggal surat dimaksud pada angka 12)
15)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional
16)	Diisi dengan nama direktur utama

www.peraturan.go.id

Contoh 7

Nomor : .....1), ...2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Omisi Kapal.....
Terhadap Trayek Tetap dan Teratur

Kepada

Yth. ..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ..... dan surat Laporan Rencana Pengoperasian Kapal .....7) Nomor..... Tanggal..... sebagaimana terlampir, bersama ini kami sampaikan surat ..... 12) Nomor ..... 13) tanggal ..... 14) perihal Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tetap Dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.

2. Sehubungan dengan .....6), maka kapal.....7) yang kami operasikan pada trayek ..... 8), setelah tiba di Pelabuhan ..... 9) akan melakukan omisi pelabuhan ..... 10).

3. Omisi tersebut akan dilakukan pada tanggal ..... 11).

4. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. (.....) 15)
An. Penanggung Jawab

(.....) 16)

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
4. ...

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 7

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut/gubernur/bupati/walikota)
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
6)	Diisi dengan penyebab kapal melakukan omisi (misalnya dalam rangka mengangkut muatan tertentu dalam jumlah tertentu)
7)	Diisi dengan nama kapal
8)	Diisi dengan trayek tetap dari kapal tersebut
9)	Diisi dengan nama pelabuhan terakhir sebelum kapal omisi
10)	Diisi dengan nama pelabuhan yang diomit atau ditinggalkan
11)	Diisi dengan tanggal omisinya
12)	Diisi dengan nomenklatur jabatan yang diberi kewenangan untuk menandatangani (Direktur Jenderal Perhubungan Laut/gubernur/bupati/walikota)
13)	Diisi dengan nomor surat dimaksud pada angka 12)
14)	Diisi dengan tanggal surat dimaksud pada angka 12)
15)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional
16)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

www.peraturan.go.id

Contoh 8

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Deviasi Trayek Kapal.....

..... 1),..... 2)

Kepada

Yth. Direktur Utama PT..... ..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ....., dan surat saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal tersebut pada pokok surat dan memperhatikan surat Dirjen Hubla No....., tanggal ..... tentang Penempatan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri dengan ini disampaikan bahwa kapal KM. ..... 6) yang dioperasikan PT.....3) telah didaftar melakukan deviasi ke Pelabuhan..... 7), dalam rangka ..... 8)

2. Deviasi dilakukan pada tanggal .....9)

3. Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan dengan surat Dirjen Hubla Nomor ..... tanggal ..... tentang penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri untuk KM.....

4. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 10)

..... 11)
..... 12)

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
4. ...

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 8

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional
6)	Diisi dengan nama kapal
7)	Diisi dengan nama pelabuhan tujuan deviasi
8)	Diisi dengan alasan deviasi
9)	Diisi dengan tanggal dilakukan deviasinya
10)	Diisi dengan nomenklatur jabatan yang diberi kewenangan untuk menandatangani
11)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
12)	Diisi dengan pangkat/golongan/Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
13)	Diisi dengan nomenklatur pejabat atasan dari pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani, sesuai penerbitan Surat Izin Usahanya (Direktur Jenderal Perhubungan Laut/gubernur/bupati/walikota)

www.peraturan.go.id

Contoh 9

Nomor : ..... 1),..... 2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Omisi Trayek Kapal.....

Kepada
Yth. Direktur Utama PT..... 3)
Jl. ..... 4)

di
.....5)

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ....., dan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan surat Dirjen Hubla Nomor ....., tanggal ..... tentang Penempatan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri dengan ini disampaikan bahwa kapal KM. ..... 6) yang dioperasikan PT..... 3) telah didaftar melakukan omisi ke Pelabuhan .....7), dalam rangka .....8)

2. Deviasi dilakukan pada tanggal ..... 9)

3. Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan dengan surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ..... tanggal ..... perihal Penempatan Kapal Dalam Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk KM.....

4. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....10)

..... 11)
.....12)

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
4. ...

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 9

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nama kapal
7)	Diisi dengan nama pelabuhan tujuan omisi
8)	Diisi dengan alasan deviasi
9)	Diisi dengan tanggal dilakukan omisi
10)	Diisi dengan nomenklatur jabatan yang diberi kewenangan untuk menandatangani
11)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
12)	Diisi dengan pangkat/golongan/Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
13)	Diisi dengan nomenklatur pejabat atasan dari pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani, sesuai penerbitan Surat Izin Usahanya (Direktur Jenderal Perhubungan Laut/gubernur/bupati/walikota)

www.peraturan.go.id

Contoh 10

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Substitusi KM.... Terhadap Trayek Tetap dan Teratur

.....1), ...2)

Kepada

Yth. .....3)
Jl. .....4)

di
.....5)

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ..... dan surat Laporan Pengoperasian Kapal ..... 7) Nomor ..... Tanggal..... sebagaimana terlampir, kami sampaikan Surat ..... 12) Nomor .....13) tanggal..... 14) perihal Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.

2. Sehubungan dengan ..... 6), maka kapal KM. ..... 7) yang kami operasikan pada trayek ..... 8), setelah tiba di Pelabuhan ..... 9) akan disubstitusi/diganti dengan Kapal KM ..... 10).

3. Substitusi tersebut akan dilakukan pada tanggal ..... 11).

4. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. (.....) 15)
An. Penanggung Jawab

(.....) 16)

Tembusan :
Ketua Umum DPP INSA

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 10

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut/gubernur/bupati/walikota)
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
6)	Diisi dengan penyebab kapal diganti dengan kapal lain (misalnya kapal utama akan dock)
7)	Diisi dengan nama kapal utama (kapal yang akan diganti)
8)	Diisi dengan trayek tetap dari kapal tersebut
9)	Diisi dengan nama pelabuhan terakhir sebelum kapal disubstitusi
10)	Diisi dengan nama kapal pengganti
11)	Diisi dengan tanggal substitusi
12)	Diisi dengan nomenklatur jabatan yang diberi kewenangan untuk menandatangani (Direktur Jenderal Perhubungan Laut/gubernur/bupati/walikota)
13)	Diisi dengan nomor surat dimaksud pada angka 12)
14)	Diisi dengan tanggal surat dimaksud pada angka 12)
15)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional
16)	Diisi dengan nama direktur utama

www.peraturan.go.id

Contoh 11

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Substitusi Kapal ....

.....1),.....2)

Kepada

Yth. Direktur Utama
PT. .....3)
Jl. .....4)

di

.....5)

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ..... dan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal laporan substitusi, dengan ini disampaikan bahwa kapal ..... 6) yang dioperasikan PT. .....3) telah didaftar melakukan substitusi Pelabuhan .....7), karena ..... 8)

2. Substitusi dilakukan pada tanggal ..... 9)

3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....10)

..... 11)
..... 12)

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
4. ....

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 11

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional
6)	Diisi dengan nama kapal utama
7)	Diisi dengan nama kapal pengganti
8)	Diisi dengan alasan penggantian kapal
9)	Diisi dengan tanggal dilakukannya penggantian kapal
10)	Diisi dengan nomenklatur jabatan yang diberi kewenangan untuk menandatangani
11)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
12)	Diisi dengan pangkat/golongan/Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
13)	Diisi dengan nomenklatur pejabat atasan dari pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani, sesuai penerbitan Surat Izin Usahanya (Direktur Jenderal Perhubungan Laut/gubernur/bupati /walikota)

www.peraturan.go.id

Contoh 12

Nomor : .....1), ...2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Penambahan Kapal pada Trayek Tetap Dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri

Kepada
Yth. ..... 3)
Jl. .....4)

di

.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ..... dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ..... tanggal ..... tentang Jaringan Trayek Tetap Dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, bersama ini kami laporkan penambahan kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :

a. Nama Kapal : .....6)
b. Bendera : .....7)
c. Nomor Pendaftaran : .....8)
d. Type : .....9)
e. Isi Kotor (GT) : .....10)
f. Bobot Mati (DWT) : .....11)
g. Tenaga Penggerak (HP) : .....12)
h. Kapasitas Angkut : .....13)
i. Status : .....14)
j. Kode Trayek : .....15)
k. Pelabuhan Pangkal : .....16)
l. Route Trayek : .....17)
m. Urgensi : .....18)

Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
a. Nomor Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut;
b. Nomor Spesifikasi Kapal;
c. Rencana jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal;
d. Penempatan Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tetap Dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya;
e. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
f. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya.

2. Masa berlaku pengoperasian kapal paling sedikit 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ..... s.d. tanggal ..... 19)

3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. (.....) 20)
An. Penanggung Jawab

(.....) 21)

Tembusan :
Ketua Umum DPP INSA

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 12

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut/gubernur/bupati/walikota)
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
6)	Diisi dengan nama kapal
7)	Diisi dengan bendera
8)	Diisi dengan nomor pendaftaran kapal
9)	Diisi dengan type kapal
10)	Diisi dengan isi kotor kapal
11)	Diisi dengan bobot mati kapal
12)	Diisi dengan tenaga penggerak
13)	Diisi dengan kapasitas angkut
14)	Diisi dengan milik/*charter*/dioperasikan
15	Diisi dengan kode trayek.
16	Diisi dengan pelabuhan asal/pangkal
17	Diisi dengan nama-nama pelabuhan yang disinggahi
18	Diisi dengan jenis muatan
19	Diisi dengan masa berlaku pengoperasian kapal
20	Diisi dengan nama perusahaan
21	Diisi dengan nama penanggung jawab

www.peraturan.go.id

Contoh 13

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Penambahan Kapal Pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
.

.....1), ...2)

Kepada

Yth. Direktur Utama PT.....3)
Jl. .....4)

di
.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ..... dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ..... tanggal ..... tentang Jaringan Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, serta surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal .....

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini kami menyetujui penambahan kapal pada Kode Trayek ..... dengan masa berlaku pengoperasian kapal paling sedikit 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ..... s.d. tanggal ..... 6)

3. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....7)

..... 8)
.....9)

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
4. ....

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 13

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut /gubernur/bupati/walikota)
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
6)	Diisi dengan masa berlaku pengoperasian kapal
7)	Diisi dengan nomenklatur jabatan yang diberi kewenangan untuk menandatangani
8)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
9)	Diisi dengan pangkat/golongan/Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani

www.peraturan.go.id

Contoh 14

Nomor	:			.....1), ...2)
Klasifikasi	:			
Lampiran	:			
Perihal	:	Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri		Kepada Yth. .....3) Jl. .....4) di .....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ....., bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :

a.	Nama Kapal	:	.....6)
b.	Nomor Pendaftaran	:	.....7)
c.	Tipe	:	.....8)
d.	Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT)	:	.....9)
e.	Tenaga Penggerak (HP)	:	.....10)
f.	Kapasitas Angkut	:	.....11)
g.	Status Kepemilikan Kapal	:	milik / sewa
h.	Pelabuhan SINGGAH	:	.....12)
i.	Urgensi	:	.....13)
j.	Nomor dan Tanggal SIUPAL	:	.....14)
k.	Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal	:	.....15)
l.	Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Periode Sebelumnya	:	.....16)

Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
a. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
b. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya.

2. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ..... s.d. tanggal ..... 17)

3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. (.....18))
An. Penanggung Jawab

(.....19))

Tembusan:
Ketua Umum DPP INSA

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 14

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut/ gubernur/bupati/walikota)
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
6)	Diisi dengan nama kapal
7)	Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan *Horse Power* (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan pelabuhan yang akan disinggahi
13)	Diisi dengan jenis muatan/penumpang
14)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL perusahaan yang bersangkutan
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya
17)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
18)	Diisi dengan nama perusahaan
19)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

www.peraturan.go.id

Contoh 15

Nomor	:			.....1), ...2)
Klasifikasi	:			
Lampiran	:			
Perihal	:	Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.	Yth.	Kepada PT .....3) Jl. .....4) di .....5)

1. Sesuai dengan Nomor Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ....., bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :

a.	Nama Kapal	:	.....6)
b.	Nomor Pendaftaran	:	.....7)
c.	Tipe	:	.....8)
d.	Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT)	:	.....9)
e.	Tenaga Penggerak (HP)	:	.....10)
f.	Kapasitas Angkut	:	.....11)
g.	Status Kepemilikan Kapal	:	milik / sewa
h.	Pelabuhansinggah	:	.....12)
i.	Urgensi	:	.....13)
j.	Nomor dan Tanggal SIUPAL	:	.....14)
k.	Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal	:	.....15)
l.	Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya	:	.....16)

   Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
   a. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
   b. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya.

2. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ..... s.d. tanggal ..... 17)

3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

..... 18)

.....19)
..... 20)

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
4. ...

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 15

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nama kapal
7)	Diisi dengan nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan pelabuhan singgah
13)	Diisi dengan urgensi
14)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL perusahaan yang bersangkutan
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal berlakunya penempatan pengoperasian kapal periode sebelumnya
17)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
18)	Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
19)	Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
20)	Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin

www.peraturan.go.id

Contoh 16

Nomor	:		.....1), ...2)
Klasifikasi	:		
Lampiran	:		
Perihal	:	Laporan Rencana Penambahan Pelabuhan Singgah pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri	Kepada Yth. ..... 3) Jl. ..... 4) di .....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ....., bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal : .....6)
   b. Nomor Pendaftaran : .....7)
   c. Tipe : .....8)
   d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : .....9)
   e. Tenaga Penggerak (HP) : .....10)
   f. Kapasitas Angkut : .....11)
   g. Status Kepemilikan Kapal : milik / sewa
   h. Pelabuhan singgah : .....12)
   i. Urgensi : .....13)
   j. Nomor dan Tanggal SIUPAL : .....14)
   k. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal : .....15)
   l. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya : .....16)

   Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
   a. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
   b. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya.

2. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ..... s.d. tanggal ..... 17)

3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. (.....) 18)
An. Penanggung Jawab

(.....) 19)

Tembusan :
Ketua Umum DPP INSA

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 16

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut/ gubernur/bupati/walikota)
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
6)	Diisi dengan nama kapal
7)	Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan grosse tonage dan *dead weight tonage*
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan *Horse Power* (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan pelabuhan yang akan disinggahi
13)	Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
14)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL perusahaan yang bersangkutan
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya
17)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
18)	Diisi dengan nama perusahaan
19)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

www.peraturan.go.id

Contoh 17

Nomor : ……1), ……..2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Penambahan Pelabuhan Singgah

Kepada

Yth. Direktur Utama PT……..3)
Jl. ……..4)

di
……..5)

1. Menunjuk surat Saudara Nomor ……6) tanggal ……7) perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan surat Dirjen Perhubungan Laut Nomor ……8) tanggal ……9) Perihal Pengoperasian Kapal Tramper di Dalam Negeri Untuk Kapal ……10).

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, kapal tersebut telah tercatat melakukan penambahan pelabuhan singgah ……11).

3. Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan dengan surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ……12) tanggal ……13) perihal Pengoperasian Kapal Tramper Di Dalam Negeri Untuk Kapal ……14).

4. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

…… 15)
……16)

…… 17)
…… 18)

Tembusan Yth. :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
4. ….

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 17

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional
6)	Diisi dengan nomor surat permohonan
7)	Diisi dengan tanggal surat permohonan
8)	Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
9)	Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
10)	Diisi dengan nama kapal
11)	Diisi dengan pelabuhan singgah
12)	Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
13)	Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
14)	Diisi dengan nama kapal
15)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
16)	Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
17)	Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
18)	Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin

www.peraturan.go.id

Contoh 18

Nomor : .....1), ...2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Rencana Penambahan Muatan pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri

Kepada
Yth. ..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

1. Sesuai ketentuan Pasal ..... dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ....., bersama ini kami menyampaikan laporan untuk memuat barang muatan umum (General Cargo) pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal : .....6)
   b. Nomor Pendaftaran : .....7)
   c. Tipe : .....8)
   d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : .....9)
   e. Tenaga Penggerak (HP) : .....10)
   f. Kapasitas Angkut : .....11)
   g. StatusKepemilikan Kapal : milik / sewa
   h. Jenis Muatan Umum yang dimuat : .....12)
   i. Pelabuhan Asal : .....13)
   j. Pelabuhan Tujuan : .....14)
   k. Nomor dan Tanggal SIUPAL : .....15)
   l. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal : .....16)
   m. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya : .....17)

2. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
(PT. .....18))
An. Penanggung Jawab

(.....19))

Tembusan :
Ketua Umum DPP INSA

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 18

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Persetujuan Mengangkut Jenis Muatan Barang Umum (*General Cargo*)
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang memberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Persetujuan Mengangkut Jenis Muatan Barang Umum (*General Cargo*)
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan *Horse Power* (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan Jenis Muatan Umum Yang di Muat
13)	Diisi dengan pelabuhan asal
14)	Diisi dengan pelabuhan tujuan
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL perusahaan yang bersangkutan
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
17)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya
18)	Diisi dengan nama perusahaan
19)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

www.peraturan.go.id

Contoh 19

Nomor : ……1), ……..2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Penambahan Urgensi Muatan Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur

Kepada

Yth. Direktur Utama PT……..3)
Jl. ……..4)

di

……5)

1. Menunjuk surat Saudara Nomor ……6) tanggal ……7) perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ……8) tanggal ……9) perihal Pengoperasian Kapal Tramper di Dalam Negeri Untuk Kapal ……10).

4. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, kapal tersebut telah tercatat melakukan penambahan urgensi muatan ……11).

5. Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan dengan surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ……12) tanggal ……13) perihal Pengoperasian Kapal Tramper di Dalam Negeri Untuk Kapal ……14).

4. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

……15)
……16)

……. 17)

…… 18)

Tembusan Yth. :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
4. ….

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 19

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional
6)	Diisi dengan nomor surat permohonan
7)	Diisi dengan tanggal surat permohonan
8)	Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
9)	Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
10)	Diisi dengan nama kapal
11)	Diisi dengan penambahan urgensi muatan
12)	Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
13)	Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
14)	Diisi dengan nama kapal
15)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
16)	Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
17)	Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
18)	Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin

www.peraturan.go.id

Contoh 20a

Nomor : .....1),.....2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Nasional Pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri

Kepada
Yth. .....3)
.....4)

di
.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ....., bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal nasional pada trayek tetap dan teratur angkutan laut luar negeri dengan data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal : .....6)
   b. Bendera / IMO No. : .....7) /.....8)
   c. Ukuran (DWT/GT/HP) : .....9)
   d. Pemilik/ Pengelola Operator Kapal : .....10)
   e. Pelabuhan Singgah/Rute yang akan dilalui : .....11)
   f. No dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS : .....12)

2. Untuk melengkapi laporan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut
   a. Salinan Penunjukan Keagenan Kapal (*Agency Of Appointment*);
   b. Salinan Perjanjuan Sewa Kapal (*Charter Party*);
   c. Salinan Perjalanan Kapal (*Sailing Schedule*);
   d. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melayari Trayek yang telah ditetapkan;
   e. Salinan Sertifikat Pendaftaran Kapal;
   f. Salinan Sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kapal;
   g. Salinan Ship's Particular/Spesifikasi kapal; *)
   h. Salinan Daftar Awak Kapal (*Crew List*).

3. Masa Berlaku Pengoperasian Kapal paling sedikit 6 (enam bulan) terhitung mulai tanggal ..... s/d.....13).

4. Demikian permohonan kami atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. .....14)
An. Penanggung Jawab

(.....15)
.....16)

Tembusan :
1. .....
2. Ketua DPC/DPP INSA

*) Coret yang tidak perlu

www.peraturan.go.id

Contoh 20b

Nomor : .....1),.....2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Asing pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri

Kepada
Yth. .....3)
.....4)

di
.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ....., bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal asing pada trayek tetap dan teratur angkutan laut luar negeri dengan data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal : .....6)
   b. Bendera / IMO No. : .....7) /.....8)
   c. Ukuran (DWT/GT/HP) : .....9)
   d. Pemilik/pengelola/operator kapal : .....10)
   e. Pelabuhan Singgah/Rute yang akan dilalui : .....11)
   f. No dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS : .....12)

2. Untuk melengkapi laporan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
   a. Salinan Penunjukan Keagenan Kapal (*Agency Of Appointment*)
   b. Salinan Perjanjuan Sewa Kapal (*Charter Party*)
   c. Salinan Perjalanan Kapal (Sailing Schedule)
   d. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melayari Trayek yang telah ditetapkan
   e. Salinan Sertifikat Pendaftaran Kapal
   f. Salinan Sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kapal
   g. Salinan Ship's Particular / Spesifikasi kapal *)
   h. Salinan Daftar Awak Kapal (*Crew List*)

3. Masa Berlaku Pengoperasian Kapal paling sedikit 6 (enam bulan) terhitung mulai tanggal ..... s/d.....13).

4. Demikian permohonan kami atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih .

Hormat Kami

PT. .....14)
An. Penanggung Jawab

(.....15)
.....16)

Tembusan :
1. Penyelenggara Pelabuhan Setempat;
2. Kacab/ GM Badan Usaha Pelabuhan Setempat ;
3. Ketua DPP/DPC INSA .

*) Coret yang tidak perlu

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 20a dan CONTOH 20b

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
5)	Diisi dengan nama daerah/kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
6)	Diisi dengan nama kapal
7)	Diisi dengan Bendera Kapal
8)	Diisi dengan Nomor IMO Kapal
9)	Diisi dengan Grosse Tonage, *Dead Weight Tonage* dan *Horse Power*
10)	Diisi dengan status kepemilikan kapal/yang mewakili pemilik kapal (*principal)*
11)	Diisi dengan nama pelabuhan yang akan disinggahi di pelabuhan Indonesia dan luar negeri
12)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
13)	Diisi dengan tanggal mulai berlaku Pengoperasian Trayek Tetap dan Teratur Kapal Angkutan Laut Luar Negeri
14)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut
15)	Diisi dengan tanda tangan direktur utama
16)	Diisi dengan nama direktur utama

www.peraturan.go.id

Contoh 21

Nomor : ……1),……..…..2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Pengoperasian Kapal ……3) padaTrayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri

Kepada
Yth. .....4)
Jl.....5)

di

……6)

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ….. Tahun …... dan surat PT……..7) No. ……..8), tanggal ……. 9) perihal permohonan Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri, bersama ini terlampir disampaikan perjalanan kapal sebagai berikut:

   a. Nama Kapal : .....3)
   b. Bendera / *IMONumber* : .....10) /.....11)
   c. Ukuran (DWT/GT/HP) : .....12)
   d. Pemilik/pengelola / operator kapal : .....13)
   e. No. dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS : .....14)

   yang akan melayari pelabuhan Indonesia ……15) dan pelabuhan tujuan di luar negeri ……16), PP, dengan frekuensi kunjungan kapal sekurang–kurangnya 1 (satu) bulan sekali, untuk periode ……. s/d…. 17).

2. Penetapan Trayek Tetap dan Teratur kepada kapal tersebut pada butir 1 (satu) diatas, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun …. tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal dan memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor …. Tahun …. tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.

3. Apabila kapal tersebut pada butir 1 (satu) tidak memenuhi kewajibannya dalam kunjungan terhadap pelabuhan sesuai *sailing schedule* maka pemberitahuan *status liner* ini akan ditinjau kembali.

4. Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

.....18)

Tembusan:
1. Dirjen Hubla;
2. Dirpelpeng Ditjen Hubla;
3. Penyelenggara Pelabuhan Setempat;
4. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
5. PT. ……..

.....19)
.....20)
NIP.....21)

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 21

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat pengoperasian trayek tetap dan teratur
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan Nama Kapal
4)	Diisi dengan pejabat yang menerima Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Utama (Persero) PT. Pelindo Ybs).
5)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerima Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
6)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang meneri Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
7)	Diisi dengan Nama Perusahaan Pelayaran
8)	Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan pelayaran
9)	Diisi dengan tanggal permohonan
10)	Diisi dengan Bendera Kapal
11)	Diisi dengan IMO Number kapal
12)	Diisi dengan *Grosse Tonage, Dead Weight Tonage* dan *Horse Power*
13)	Diisi dengan pemilik/pengelola/operator kapal
14)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
15)	Diisi dengan Pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan dalam negeri
16)	Diisi dengan Pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan Luar Negeri
17)	Diisi dengan tanggal mulai berlaku Pengoperasian Trayek Tetap dan Teratur Kapal Anagkutan Laut Luar Negeri
18)	Diisi dengan jabatan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
19)	Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
20)	Diisi dengan Pangkat/Golongan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
21)	Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)

www.peraturan.go.id

Contoh 22

Nomor : .....1),.....2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Rencana Pengoperasian Kapal Nasional pada Angkutan Laut Luar Negeri

Kepada
Yth. .....3)
Jl. .....4)

di
.....5)

Dengan hormat,

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ....., bersama ini diberitahukan rencana Pengoperasian Kapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri, dengan data-data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal / *Voyage* : .....6)
   b. Bendera / *IMO Number* : .....7) / .....8)
   c. Ukuran (DWT/GT/HP) : .....9)
   d. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS : .....10)
   e. Pemilik/ pengelola/operator kapal : .....11)
   f. Status Kapal : .....12)
   g. Pelabuhan Singgah : .....13)
   h. E T A / ETD : .....14) /.....15)
   i. Kegiatan B/M : .....16)
   j. Pelabuhan Asal/Tujuan *) : .....17)
   k. *Crew List*/ Kebangsaan : .....18)

2. Untuk melengkapi pemberitahuan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut:
   a. Salinan Perjalanan Kapal *(Sailing Schedule)*;
   b. Salinan Sertifikat Pendaftaran Kapal;
   c. Salinan Sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kapal;
   d. Salinan Ship's Particular/Spesifikasi kapal *)
   e. Salinan Daftar Awak Kapal (*Crew List*).

3. Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan bantuan bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. .....19)
An. Penanggung Jawab

(.....20)
.....21)

Tembusan :
1. Dirjen Hubla;
2. Deputy II Bakin *);
3. BAIS TNI *);
4. Ditjen Imigrasi *);
5. Penyelenggara Pelabuhan Setempat.

Coret yang tidak perlu*)

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 22

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
6)	Diisi dengan nama dan voyage kapal
7)	Diisi dengan Bendera Kapal
8)	Diisi dengan Nomor IMO Kapal
9)	Diisi dengan *Grosse Tonage, Dead Weight Tonage* dan *Horse Power*
10)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
11)	Diisi dengan nama pemilik /pengelola/operator kapal (*principal*)
12)	Diisi dengan status kepemilikan kapal/yang mewakili pemilik kapal (*principal*)
13)	Diisi dengan nama pelabuhan yang akan disinggahi di pelabuhan Indonesia
14)	Diisi dengan tanggal ketibaan kapal
15)	Diisi dengan tanggal keberangkatan kapal
16)	Diisi dengan kegiatan bongkar/muat kapal
17)	Diisi dengan pelabuhan asal/tujuan di luar negeri
18)	Diisi dengan daftar awak kapal dan kebangsaannya
19)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut
20)	Diisi dengan tanda tangan direktur utama
21)	Diisi dengan nama direktur utama

www.peraturan.go.id

Contoh 23

Nomor : ……1),……..2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional ……3) Angkutan Laut Luar Negeri

Kepada
Yth. .....4)
Jl. .....5)

di

……..6)

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ….. Tahun …… dan surat Saudara Nomor ……7) tanggal ……. 8), bersama ini terlampir disampaikan perjalanan kapal sebagai berikut :

   a. Nama Kapal / Voyage : .....3)
   b. Bendera/ IMO Number : .....9) / .....10)
   c. Ukuran (DWT/GT/HP) : .....11)
   d. Pemilik/pengelola/operator kapal : ……12)
   e. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS: ……13)
   f. Status Kapal : ……14)
   g. Pelabuhan Singgah : .....15)
   h. E T A / ETD : .....16) / .....17)
   i. Kegiatan B/M : ……18)
   j. Pelabuhan Asal/Tujuan *) : ……19)
   k. Crew List/ Kebangsaan : ……20)
   l. Keterangan : ……21)

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu), dengan ini diberitahukan bahwa rencana pengoperasian kapal perusahaan Saudara telah memenuhi persyaratan dan dicatat di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional;
   b. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung terhadap perjanjian pengangkutan yang dilakukan pemilik barang dan pengangkut;
   c. Melaporkan realisasi kegiatan kapal milik setiap 3 (tiga) bulan.

3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....22)

(.....23)
.....24)
NIP.....25)

Tembusan :
1. Dirjen Hubla;
2. Dirjen Imigrasi;
3. Deputy II Bakin ;
3. BAIS TNI ;
4. ASOPS KSAL;
5. Penyelenggara Pelabuhan Setempat.

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 23

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat pengoperasian trayek tetap dan teratur
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan Nama Kapal
4)	Diisi dengan pejabat yang menerima Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Utama (Persero) PT. Pelindo Ybs)
5)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerima Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
6)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang meneri Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
7)	Diisi dengan nomor surat perusahaan pelayaran
8)	Diisi dengan tanggal surat permohonan perusahaan pelayaran
9)	Diisi dengan Bendera Kapal
10)	Diisi dengan IMO Number kapal
11)	Diisi dengan grosse tonage, dead weight tonage dan *Horse Power*
12)	Diisi dengan pemilik/pengelola/operator kapal
13)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
14)	Diisi dengan status kepemilikan kapal
15)	Diisi dengan Pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan dalam negeri
16)	Diisi dengan tanggal ketibaan kapal
17)	Diisi dengan tanggal keberangkatan kapal
18)	Diisi dengan kegiatan bongkar/muat kapal
19)	Diisi dengan Pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan Luar Negeri
20)	Diisi dengan daftar awak kapal dan kebangsaannya
21)	Diisi dengan hal-hal lain terkait keperluan kapal
22)	Diisi dengan jabatan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
23)	Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
24)	Diisi dengan Pangkat/Golongan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
25)	Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)

www.peraturan.go.id

Contoh 24

Nomor : .....1),.....2)
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Perubahan (Deviasi) Pengoperasian Kapal Nasional ke Luar Negeri

Kepada
Yth. .....3)
Jl. .....4)

di
.....5)

Dengan hormat,

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ....., bersama ini diberitahukan rencana deviasi angkutan laut luar negeri untuk kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur, dengan data-data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal / *Voyage* : .....6)
   b. Bendera/IMO Number : .....7) / .....8)
   c. Ukuran (DWT/GT/HP) : .....9)
   d. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS : .....10)
   e. Pemilik/pengelola /operator kapal : .....11)
   f. Status Kapal : .....12)
   g. Pelabuhan asal di Indonesia : .....13)
   h. E T A / ETD : .....14) /.....15)
   i. Kegiatan B/M : .....16)
   j. Pelabuhan tujuan : .....17)
   k. Crew List/ Kebangsaan : .....18)
   l. Nomor dan tanggal Spesifikasi Kapal : .....19)
   m. Nomor dan tanggal Pengoperasian Kapal Pada Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri : .....20)

2. Untuk melengkapi laporan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
   a. Salinan laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut dalam negeri;
   b. Salinan Sertifikat Pendaftaran Kapal;
   c. Salinan Sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kapal; dan
   d. Salinan Daftar Awak Kapal (*Crew List*).

3. Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan bantuan bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. .....21)
An. Penanggung Jawab

(.....22)
.....23)

Tembusan :
Ketua umum DPP INSA

Coret yang tidak perlu*

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 24

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat pengoperasian trayek tetap dan teratur
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerima Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Utama (Persero) PT. Pelindo Ybs)
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerima Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang meneri Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
6)	Diisi dengan nama dan *voyage* kapal
7)	Diisi dengan Bendera Kapal
8)	Diisi dengan IMO Number kapal
9)	Diisi dengan *grosse tonage, dead weight tonage dan Horse Power*
10)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
11)	Diisi dengan status kepemilikan kapal
12)	Diisi dengan pemilik/pengelola/operator kapal
13)	Diisi dengan nama pelabuhan asal/tujuan di Indonesia sesuai RPT
14)	Diisi dengan tanggal ketibaan kapal
15)	Diisi dengan tanggal keberangkatan kapal
16)	Diisi dengan kegiatan bongkar/muat kapal
17)	Diisi dengan nama pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan Luar Negeri
18)	Diisi dengan daftar awak kapal dan kebangsaannya
19)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
20)	Diisi dengan nomor dan tanggal Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Teratu Angkutan Laut Dalam Negeri
21)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut
22)	Diisi dengan tanda tangan direktur utama
23)	Diisi dengan nama direktur utama

www.peraturan.go.id

Contoh 25

Nomor : ……1),……..……..2)
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Perubahan (Deviasi) Pengoperasian Kapal Nasional ke Luar Negeri

Kepada
Yth. .....3)
.....4)
di
……..5)

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ..... dan surat Saudara Nomor ……6), tanggal ……. 7) perihal pada pokok surat serta memperhatikan surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor……8) tanggal ……9) tentang Penempatan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri, bersama ini disampaikan data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal / *Voyage* : .....10)
   b. Bendera/ *IMONumber* : .....11) / ....12)
   c. Ukuran (DWT/GT/HP) : .....13)
   d. Pemilik/ pengelola / operator kapal : ……14)
   e. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS : ……15)
   f. Status Kapal : ……16)
   g. Crew List/ Kebangsaan : ……17)
   h. Keterangan : ……..18)

2. Berdasarkan pemberitahuan Saudara bahwa kapal……10) akan melakukan Deviasi ke luar negeri ……19) dari Pelabuhan……20) ETD……21) dalam rangka B/M……22) dan setelah itu kembali ke trayek semula.

3. Sehubungan dengan butir 1 (satu) dan 2 (dua), dengan ini diberituhukan bahwa rencana deviasi angkutan laut luar negeri Kapal perusahaan Saudara telah memenuhi persyaratan dan dicatat di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional;
   b. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dilakukan pemilik barang dengan pengangkut;
   c. Melaporkan realisasi kegiatan kapal tersebut di atas.

4. Surat pemberitahuan ini merupakan satu kesatuan dengan surat Dirjen Hubla No. .....8) tanggal .....9) tentang penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri untuk kapal.....10)

5. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....23)

.....24)
.....25)
.....26)

Tembusan :
1. Dirjen Hubla;
2. Dirjen Imigrasi;
3. Deputi V BIN TNI;
4. Asops KSAL;
5. Kepala BAIS TNI;
6. Kasubdit Angla Dalam Negeri;
7. Kepala Penyelenggara Pelabuhan ..... 27);

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 25

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat pengoperasian trayek tetap dan teratur
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerima Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Utama (Persero) PT. Pelindo Ybs)
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerima Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang meneri Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
6)	Diisi dengan nomor surat perusahaan pelayaran
7)	Diisi dengan tanggal surat permohonan perusahaan pelayaran
8)	Diisi dengan nomor surat Pengoperasian Kapal Pada Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri
9)	Diisi dengan tanggal surat Pengoperasian Kapal Pada Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri
10)	Diisi dengan nama dan voyage kapal
11)	Diisi dengan Bendera Kapal
12)	Diisi dengan IMO *Number* kapal
13)	Diisi dengan *Grosse Tonage, Dead Weight Tonage dan Horse Power*
14)	Diisi dengan pemilik/pengelola/operator kapal
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
16)	Diisi dengan status kepemilikan kapal
17)	Diisi dengan daftar awak kapal dan kebangsaannya Pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan dalam negeri
18)	Diisi dengan keterangan lain-lain yang diperlukan
19)	Diisi dengan nama pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan luar negeri
20)	Diisi dengan nama pelabuhan asal di Indonesia
21)	Diisi dengan tanggal keberangkatan kapal
22)	Diisi dengan kegiatan bongkar/muat barang
23)	Diisi dengan jabatan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
24)	Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
25)	Diisi dengan Pangkat/Golongan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
26)	Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
27)	Diisi dengan nama Kantor Otoritas Pelabuhan, Syahbandar, KSOP, Unit Penyelenggara Pelabuhan/Kantor Pelabuhan yang bersangkutan

www.peraturan.go.id

Contoh 26

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Kegiatan Kapal Berbendera Indonesia yang Dioperasikan di Luar Negeri

.....1),.....2)

Kepada

Yth. .....3)
Jl. .....4)

di
.....5)

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ....., bersama ini diberitahukan rencana kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri, dengan data-data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal/*Voyage* : .....6)
   b. Bendera / *IMO Number* : .....7) / .....8)
   c. Ukuran (DWT/GT/HP) : .....9)
   d. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS : .....10)
   e. Pemilik/ pengelola /operator kapal : .....11)
   f. Status Kapal : .....12)
   g. Periode/masa berlaku : .....13)
   h. Nomor dan tanggal Spesifikasi Kapal : .....14)
   i. Pelabuhan di Luar Negeri : .....15)

2. Untuk melengkapi laporan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
   a. spesifikasi kapal yang dioperasikan;
   b. nama pelabuhan keberangkatan dan kedatangan di Indonesia;
   c. bukti pengoperasian kapal berbendera Indonesia di luar negeri;
   d. salinan sertifikat pendaftaran kapal;
   e. salinan sertifikat keselamatan kapal;
   f. salinan sertifikat keamanan kapal; dan
   g. daftar awak kapal (*crew list*).

3. Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan bantuan bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. .....16)
An. Penanggung Jawab

(.....17)
.....18)

Tembusan :
Ketua Umum DPP INSA

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 26

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat Pemberitahuan Kegiatan Kapal Berbendera Indonesia yang Dioperasikan di Luar Negeri
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri
6)	Diisi dengan Nama Kapal
7)	Diisi dengan bendera Kapal
8)	Diisi dengan Nomor IMO
9)	Diisi dengan *Dead Weight Tonage, Grosse Tonage dan Horse Power*
10)	Diisi dengan Nomor dan Tanggal SIUPAL/SIOPSUS
11)	Diisi dengan nama pemilik/pengelola/operator kapal
12)	Diisi dengan status kepemilikan kapal/yang mewakili pemilik kapal (principal)
13)	Diisi dengan masa berlaku kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri
14)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
15)	Diisi dengan nama pelabuhan selama kapal nasional beroperasi di luar negeri
16)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut
17)	Diisi dengan tanda tangan direktur utama perusahaan angkutan laut
18)	Diisi dengan nama direktur utama perusahaan angkutan laut

www.peraturan.go.id

Contoh 27

Nomor	:			……1),……..2)
Klasifikasi	:			
Lampiran	:			
Perihal	:	Persetujuan Kegiatan Kapal Berbendera Indonesia Yang Dioperasikan di Luar Negeri		Kepada
			Yth.	.....3)
				Jl. .....4)
				di
				……5)

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ..... dan surat Saudara Nomor ……6), tanggal ……. 7) perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, rencana kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di Luar Negeri dengan data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal / *Voyage* : .....8)
   b. Bendera / IMO No. : .....9) / .....10)
   c. Ukuran (DWT/GT/HP) : .....11)
   d. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS : ……12)
   e. Pemilik/ pengelola / operator kapal : ……13)
   f. Status Kapal : ……14)
   g. Periode/masa berlaku : .....15)
   h. Nomor dan tanggal Spesifikasi Kapal : ……16)
   i. Pelabuhan di Luar Negeri : ……17)

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu), dengan ini diberitahukan bahwa rencana pengoperasian kapal Saudara telah memenuhi persyaratan dan dicatat dalam daftar kapal milik di Ditjen Perhubungan Laut, dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional;
   b. Mengurus kepentingan kapal Saudara dan bertanggung jawab atas biaya kapal selama berada di pelabuhan di luar negeri;
   c. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dilakukan pemilik barang dengan pengangkut;
   d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap kapal-kapal nasional yang menyinggahi pelabuhan-pelabuhan di luar negeri yang belum *comply* dengan ketentuan SOLAS 1974 *Chapter XI-2* (ISPS Code 2002).

3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....18)

……19)
.....20)
.....21)

Tembusan Yth :
1. Dirjen Hubla;
2. Dirjen Imigrasi;
3. Deputi V BIN TNI;
4. Deputi OPS KSAL;
5. Kepala BAIS TNI;
6. Ketua Umum DPP INSA.

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 27

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat pengoperasian trayek tetap dan teratur
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan nama perusahaan pelayaran
4)	Diisi dengan alamat kantor perusahaan pelayaran
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan pelayaran
6)	Diisi dengan nomor surat perusahaan pelayaran
7)	Diisi dengan tanggal surat perusahaan pelayaran
8)	Diisi dengan Nama Kapal
9)	Diisi dengan bendera Kapal
10)	Diisi dengan Nomor IMO
11)	Diisi dengan *Dead Weight Tonage, Grosse Tonage dan Horse Power*
12)	Diisi dengan Nomor dan Tanggal SIUPAL/SIOPSUS
13)	Diisi dengan nama pemilik kapal/operator kapal
14)	Diisi dengan status kapal
15)	Diisi dengan periode/masa berlaku
16)	Diisi dengan Nomor dan tanggal Spesifikasi Kapal
17)	Diisi dengan nama pelabuhan selama kapal nasional beroperasi di luar negeri
18)	Diisi dengan nama jabatan yang menerbitkan Surat Pemberitahuan kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
19)	Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
20)	Diisi dengan Pangkat/Golongan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
21)	Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)

www.peraturan.go.id

Contoh 28

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengoperasian Kapal Nasional Pada Trayek Lintas Batas

.....1),.....2)

Kepada

Yth. .....3)
Jl. .....4)

di

.....5)

Dengan hormat,

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ....., bersama ini diberitahukan bahwa rencana Pengoperasian Kapal Nasional Pada Trayek Lintas Batas .....6), dengan data-data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal/*Voyage* : .....7)
   b. Bendera : .....8)
   c. Ukuran (DWT/GT/HP) : ....9)
   d. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS/SIUPER : ..... 10)
   e. Pemilik/pengelola/operator kapal : .....11)
   f. Status Kapal : ..... 12)
   g. Pelabuhan Singgah : ....13)
   h. E T A / ETD : .....14) /.....15)
   i. Kegiatan B/M : .....16)
   j. Pelabuhan Asal/Tujuan *) : .....17)
   k. Crew List/Kebangsaan : .....18)

2. Untuk melengkapi pemberitahuan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
   a. Salinan kesepakatan dari usulan kelompok kerja sub regional dan/atau kesepakatan pemerintah kedua negara yang berbatasan;
   b. Salinan Perjalanan Kapal (*Sailing Schedule*);
   c. Salinan Sertifikat Pendaftaran Kapal;
   d. Salinan Sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kapal;
   e. Salinan Ship's Particular/Spesifikasi kapal; *)
   f. Salinan Daftar Awak Kapal (*Crew List*).

3. Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan bantuan bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Kami

PT. .....19)
An. Penanggung Jawab

(.....20)
.....21)

Tembusan :
1. Dirjen Hubla;
2. Deputy II Bakin *);
3. BAIS TNI *);
4. Ditjen Imigrasi *);
5. Kepala Penyelenggara Pelabuhan Setempat.

Coret yang tidak perlu*)

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 28

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek LIntas Batas (gubernur kepala daerah provinsi)
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek Lintas Batas
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek Lintas Batas
6)	Diisi dengan nama pelabuhan dan negara yang disinggahi (Contoh : Nunukan (Indonesia) – Tawau (Malaysia))
7)	Diisi dengan nama dan voyage kapal
8)	Diisi dengan Bendera Kapal
9)	Diisi dengan *Grosse Tonage, Dead Weight Tonage dan Horse Power*
10)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS/SIUPER
11)	Diisi dengan nama pemilik/pengelola/perator kapal (*principal*)
12)	Diisi dengan status kepemilikan kapal/yang mewakili pemilik kapal (*principal*)
13)	Diisi dengan nama pelabuhan yang akan disinggahi di pelabuhan Indonesia
14)	Diisi dengan tanggal ketibaan kapal
15)	Diisi dengan tanggal keberangkatan kapal
16)	Diisi dengan kegiatan bongkar/muat kapal
17)	Diisi dengan pelabuhan asal/tujuan di luar negeri
18)	Diisi dengan daftar awak kapal dan kebangsaannya
19)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut
20)	Diisi dengan tanda tangan direktur utama
21)	Diisi dengan nama direktur utama

www.peraturan.go.id

Contoh 29

Nomor : ……..1),……..2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional ……3) Pada Trayek Lintas Batas

Kepada
Yth. .....4)
.....5)

di
……6)

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ….. Tahun …… dan surat Saudara Nomor……7), tanggal ……. 8), bersama ini terlampir disampaikan perjalanan kapal nasional pada trayek lintas batas ……9) sebagai berikut :

   a. Nama Kapal / *Voyage* : ..... 3)
   b. Bendera : .....10)
   c. Ukuran (DWT/GT/HP) : .....11)
   d. Pemilik/ pengelola / operator kapal : ……12)
   e. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS/SIUPER : ……13)
   f. Status Kapal : ……14)
   g. Pelabuhan Singgah : .....15)
   h. E T A / ETD : .....16) / .....17)
   i. Kegiatan B/M : ……18)
   j. Pelabuhan Asal/Tujuan *) : ……19)
   k. Crew List/ Kebangsaan : ……20)
   l. Keterangan : ……21)

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu), dengan ini diberitahukan bahwa rencana pengoperasian kapal perusahaan Saudara telah memenuhi persyaratan dan dicatat di Gubernur Kepala Daerah Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional;
   b. Gubernur Kepala Daerah Provinsi tidak bertanggung terhadap perjanjian pengangkutan yang dilakukan pemilik barang dan pengangkut;
   c. Melaporkan realisasi kegiatan kapal milik setiap 3(tiga) bulan.

3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....22)

(.....23)
.....24)
NIP.....25)

Tembusan :
1. Dirjen Hubla;
2. Dirjen Imigrasi;
3. Deputy II Bakin ;
3. BAIS TNI ;
4. ASOPS KSAL;
5. Kepala Penyelenggara Pelabuhan Setempat.

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 29

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat pengoperasian trayek tetap dan teratur
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan Nama Kapal
4)	Diisi dengan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan/ Syahbandar/UPP yang bersangkutan
5)	Diisi dengan pejabat yang menerima Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek Lintas Batas (Direktur Utama PT. Pelindo/ BUP Ybs)
6)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang meneri Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek Lintas Batas
7)	Diisi dengan nomor surat perusahaan pelayaran
8)	Diisi dengan tanggal surat permohonan perusahaan pelayaran
9)	Diisi dengan nama pelabuhan dan negara yang disinggahi ((Contoh : Nunukan (Indonesia) – Tawau (Malaysia))
10)	Diisi dengan Bendera Kapal
11)	Diisi dengan *Grosse Tonage, Dead Weight Tonage dan Horse Power*
12)	Diisi dengan pemilik/pengelola/operator kapal
13)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS/SIUPER
14)	Diisi dengan status kepemilikan kapal
15)	Diisi dengan Pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan dalam negeri
16)	Diisi dengan tanggal ketibaan kapal
17)	Diisi dengan tanggal keberangkatan kapal
18)	Diisi dengan kegiatan bongkar/muat kapal
19)	Diisi dengan Pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan Luar Negeri.
20)	Diisi dengan daftar awak kapal dan kebangsaannya
21)	Diisi dengan hal-hal lain terkait keperluan kapal
22)	Diisi dengan jabatan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek LIntas Batas (Gubernur Kepala Daerah Provinsi)
23)	Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek LIntas Batas (Gubernur Kepala Daerah Provinsi)
24)	Diisi dengan Pangkat/Golongan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek LIntas Batas (Gubernur Kepala Daerah Provinsi).
25)	Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek LIntas Batas (Gubernur Kepala Daerah Provinsi)
26)	Diisi dengan nama kantor pelabuhan yang bersangkutan

www.peraturan.go.id

Contoh 30

Nomor : ……1),……..…..2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)

Kepada
Yth. .....3)
Jl. .....4)

di

.....5)

Dengan hormat,

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ....., bersama ini kami memyampaikan rencana Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA), dengan data-data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal/*Voyage* : .....6)
   b. Bendera/*IMO Number* : .....7) /.....8)
   c. Ukuran (DWT/GT/HP) : .....9)
   d. *Owner / Principal* : .....10)
   e. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS : ……11)
   f. Status : .....12)
   g. Pelabuhan Singgah : .....13)
   h. *Port Agent* / Sub Agent : .....14)
   i. E T A / ETD : .....15)
   j. Kegiatan : ……..16)
   k. B/M : .....17)
   l. Pelabuhan Asal/Tujuan : .....18)
   m. *Crew List*/ Kebangsaan : .....19)

2. Untuk melengkapi pemberitahuan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
   a. Salinan surat penunjukan keagenan kapal atau surat perjanjian keagenan umum (*letter of appointment / agency agreement);*
   b. Salinan Perjalanan Kapal (*Sailing Schedule*);
   c. Salinan Sertifikat Pendaftaran Kapal
   d. Salinan Sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kapal (ISSC/SSO/CSO);
   e. Salinan Ship's Particular/Spesifikasi kapal *);
   f. Salinan Daftar Awak Kapal (*Crew List*);
   g. Salinan Daftar Penumpang (*Passenger List);*
   h. Salinan sertifikat terkait lainnya sesuai kegiatan kapal asing.

2. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. .....20)
An. Penanggung Jawab

(.....21)
.....22)

Tembusan :
Ketua Umum DPP INSA

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 30

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut yang mengajukan Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing
6)	Diisi dengan Nama Kapal
7)	Diisi dengan bendera Kapal
8)	Diisi dengan Nomor IMO
9)	Diisi dengan dead weight tonage, grosse tonage, dan Horse Power
10)	Diisi dengan status kepemilikan kapal/yang mewakili pemilik kapal *(principal)*
11)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
12)	Diisi dengan status trayek tetap/tidak tetap
13)	Diisi dengan nama pelabuhan yang akan disinggahi di Indonesia
14)	Diisi dengan nama perusahaan pelayaran yang ditunjuk agen umum mewakili kegiatannya di pelabuhan yang akan disinggahi di Indonesia.
15)	Diisi dengan tanggal rencana kedatangan/keberangkatan kapal ke/dari pelabuhan di Indonesia
16)	Diisi dengan kegiatan kapal di pelabuhan dengan melampirkan salinan surat pendukung kegiatan dimaksud
17)	Diisi dengan bongkar/muat barang/jenis muatan di pelabuhan
18)	Diisi dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan kapal diluar negeri
19)	Diisi dengan daftar dan kebangsaan awak kapal
20)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut
21)	Diisi dengan tanda tangan direktur utama perusahaan angkutan laut
22)	Diisi dengan nama direktur utama perusahaan angkutan laut

www.peraturan.go.id

Contoh 31

Nomor : ……1),……..2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)

Kepada
Yth. .....3)
.....4)

di
……5)

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ….. Tahun …… dan surat Saudara Nomor ……6), tanggal …… 7), bersama ini disampaikan rencana kedatangan/keberangkatan kapal yang saudara ageni sebagai berikut :

a. Nama Kapal/*Voyage*	:	.....8)
b. Bendera/*IMO Number*	:	.....9) / .....10)
c. Ukuran (DWT/GT/HP)	:	....11)
d. Owner /*Principal*	:	....12)
e. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS	:	……..13)
f. Status	:	....14)
g. Pelabuhan Singgah	:	....15)
h. *Port Agent / Sub Agent*	:	....16)
i. E T A / ETD	:	....17)
j. Kegiatan	:	……18)
k. B/M	:	....19)
l. Pelabuhan Asal/Tujuan	:	....20)
m. Crew List/ Kebangsaan	:	....21)

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, dengan ini disetujui bahwa rencana kedatangan/keberangkatan kapal asing yang diageni perusahaan Saudara telah memenuhi persyaratan dan telah dicatat dalam daftar kapal keagenan asing di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan ketentuan sebagai berikut :

   a. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional;
   b. Mengurus kepentingan kapal asing yang diageni dan bertanggung jawab atas biaya kapal selama berada di pelabuhan Indonesia;
   c. Dilarang untuk mengangkut muatan dan/ atau penumpang antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia *(azas cabotage)* serta melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM …. Tahun ……;

www.peraturan.go.id

d. Surat ini hanya berlaku sebagai Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) bagi kapal asing yang melakukan kegiatan di pelabuhan atau terminal khusus di Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri di wilayah perairan Republik Indonesia;
e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dilakukan pemilik barang dengan pengangkut;
f. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap kapal-kapal asing yang menyinggahi pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang belum *comply* dengan ketentuan SOLAS 1974 *Chapter* XI-2 (ISPS Code 2002);
g. Melaporkan realisasi kegiatan keagenan kapal asing setiap 3 (tiga) bulan.

3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....22)

(.....23)
.....24)
NIP.....25)

Tembusan :
1. Dirjen Hubla;
2. Dirjen Imigrasi;
3. Deputy V BIN TNI;
3. Asops KSAL;
4. ASOPS KSAL;
5. Kepala BAIS TNI;
6. Kepala Penyelenggara Pelabuhan Setempat;
7. Kacab/GM Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
9. DPP INSA.

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 31

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan nama direktur perusahaan angkutan laut
4)	Diisi dengan alamat kantor perusahaan angkutan laut
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan angkutan laut
6)	Diisi dengan nomor surat perusahaan angkutan laut
7)	Diisi dengan tanggal surat perusahaan angktan laut
8)	Diisi dengan nama kapal
9)	Diisi dengan bendera Kapal
10)	Diisi dengan Nomor IMO
11)	Diisi dengan *Dead Weight Tonage*, Grosse Tonage, dan *Horse Power*
12)	Diisi dengan status kepemilikan kapal/yang mewakili pemilik kapal (principal)
13)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
14)	Diisi dengan status trayek tetap/tidak tetap
15)	Diisi dengan nama pelabuhan yang akan disinggahi di Indonesia
16)	Diisi dengan nama perusahaan pelayaran yang ditunjuk agen umum mewakili kegiatannya di pelabuhan yang akan disinggahi di Indonesia
17)	Diisi dengan tanggal kedatangan/keberangkatan kapal ke/dari pelabuhan di Indonesia
18)	Diisi dengan kegiatan kapal di pelabuhan
19)	Diisi dengan bongkar/muat barang/jenis muatan di pelabuhan
20)	Diisi dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan kapal di luar negeri
21)	Diisi dengan daftar dan kebangsaan awak kapal
22)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
23)	Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
24)	Diisi dengan Pangkat/Golongan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
25)	Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)

www.peraturan.go.id

Contoh 32

LAPORAN REALISASI KEDATANGAN KAPAL ASING YANG DIAGENI/PEMBERITAHUAN KEAGENAN KAPAL ASING (PKKA)

Nama Perusahaan Angkutan Laut : .....1)
Alamat Perusahaan : .....2)
Nomor SIUPAL / SIOPSUS : .....3)
Periode Laporan : .....4)

NO	NAMA KAPAL	Bendera / IMO	Ukuran			Owner/Principal	Pelabuhan Singgah	ETA / ETD	Pelabuhan Asal/ Tujuan	Kegiatan		Jenis Muatan
			DWT	GT	HP					Bongkar	Muat	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

.....18) , ...19)
PT. .....1)

(.....20)
.....21)

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 32

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut
2)	Diisi dengan alamat perusahaan angkutan laut
3)	Diisi dengan nomor SIUPAL/SIOPSUS
4)	Diisi dengan periode laporan
5)	Diisi dengan nomor urut
6)	Diisi dengan nama kapal
7)	Diisi dengan bendera Kapal dan nomor IMO
8)	Diisi dengan Dead Weight Tonage
9)	Diisi dengan *Grosse Tonage*
10)	Diisi dengan *Horse Power*
11)	Diisi dengan status kepemilikan kapal/yang mewakili pemilik kapal (*principal*)
12)	Diisi dengan nama pelabuhan yang disinggahi di Indonesia
13)	Diisi dengan tanggal kedatangan/keberangkatan kapal ke/dari pelabuhan di Indonesia
14)	Diisi dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan kapal diluar negeri
15)	Diisi dengan jumlah muatan yang dibongkar
16)	Diisi dengan jumlah muatan yang dimuat
17)	Diisi dengan jenis muatan
18)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut yang mengajukan Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)
19)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya laporan
20)	Diisi dengan tanda tangan direktur utama perusahaan angkutan laut
21)	Diisi dengan nama direktur utama perusahaan angkutan laut

www.peraturan.go.id

Contoh 33

Nomor : ……..1),……..2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan *Certificate of Shipowners Representative (COR)*

Kepada
Yth. .....3)
Jl. .....4)
di
……..5)

Dengan hormat,

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ….. Tahun ……, bersama ini kami menyampaikan Permohonan *Certificate of Shipowners Representative (COR)* sehubungan dengan adanya tenaga kerja asing di perusahaan kami, dengan data-data sebagai berikut :

   a. Nama : .....6)
   b. Kebangsaan : .....7)
   c. Nomor Passpor : .....8)
   d. Tempat & Tgl Lahir : ....9)
   e. Jabatan : ....10)
   f. Alamat : ....11)
   g. Periode : .....12)
   h. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS : ……..…… 13)

   Tenaga kerja asing dimaksud yang bekerja di perusahaan kami menjadi tanggung jawab kami.

2. Untuk melengkapi permohonan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
   a. Salinan surat penunjukan sebagai perwakilan perusahaan angkutan laut asing yang diketahui Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Republik Indonesia di negara bersangkutan bagi warga negara asing;
   b. Salinan kartu izin tinggal sementara dari instansi terkait bagi warga negara asing;
   c. Salinan Rekomendasi dari Kemenaker;
   d. Salinan daftar riwayat hidup dari perorangan yang ditunjuk sebagai perwakilan;
   e. Salinan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang, dan
   f. Salinan sertifikat keahlian, sesuai posisi yang diajukan;
   g. Pas photo terbaru;
   h. memiliki surat keterangan sudah melunasi pajak tahun terakhir dan NPWP yang masih berlaku

3. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. .....14)
An. Penanggung Jawab

(.....15)
.....16)

Tembusan :
Ketua Umum DPP INSA

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 33

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut yang mengajukan *Certificate of Shipowners Representative*
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan *Certificate of Shipowners Representative* (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan *Certificate of Shipowners Representative* (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan *Certificate of Shipowners Representative*
6)	Diisi dengan nama orang yang ditunjuk sebagai *Owner Representative*
7)	Diisi dengan kebangsaan orang yang ditunjuk sebagai *Owner Representative*
8)	Diisi dengan nomor passpor orang yang ditunjuk sebagai *Owner Representative*
9)	Diisi dengan tempat tanggal lahir orang yang ditunjuk sebagai *Owner Representative*
10)	Diisi dengan jabatan orang yang ditunjuk sebagai *Owner Representative*
11)	Diisi dengan alamat orang yang ditunjuk sebagai *Owner Representative*
12)	Diisi dengan tanggal berlakunya masa kerja orang yang ditunjuk sebagai *Owner Representative*
13)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS perusahaan angkutan laut yang mengajukan *Certificate of Shipowners Representative*
14)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut yang mengajukan *Certificate of Shipowners Representative*
15)	Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab perusahaan angkutan laut yang mengajukan *Certificate of Owners Representative*
16)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan angkutan laut yang mengajukan *Certificate of Owners Representative*

www.peraturan.go.id

Contoh 34

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA Lt. 12 s/d 17
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Telp. 3811308 Ps.: 4114, 4223, 4227
J A K A R T A

CERTIFICATE OF OWNER'S REPRESENTATIVE

UNTUK YANG BERKEPENTINGAN	*TO WHOM IT MAY CONCERN*
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Republik Indonesia di Jakarta, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM...Tahun....tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, menyatakan dan meresmikan tuan tersebut di bawah ini :	*The Director General of Sea Transportation of the Republic of Indonesia, based on Minister of Transportation's Decree No..... Year ..... regarding The Operation dan Business of Sea Transport, certify and legalize undermentioned gentleman*

Nama/*Name* : .....1)
Kebangsaan/*Nationality* : .....2)
Kantor/*Office* : .....3)
.....4)
.....5)

Sebagai Perwakilan Perusahaan Angkutan Laut Asing dari :	*As Owner's Representative of :*
" .....6)"	
dan telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut R.I	*And has been duly registered at the Directorate General of Sea Transportation of the Republic of Indonesia.*
SERTIFIKAT INI DIBUAT DI JAKARTA DAN BERLAKU UNTUK 1 (SATU) TAHUN SEMENJAK TANGGAL .....7)	*This certificate is issued in Jakarta and valid for : 1 (one) year effective from* .....*7)*
Ketentuan : Perwakilan perusahaan angkutan laut asing di Indonesia dilarang melakukan kegiatan keagenan.	*Conditions :* *Shipowner's Representative is prohibited to carry out agency activities.*
Perwakilan perusahaan angkutan laut asing diwajibkan melaporkan kegiatannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut d.h.i Direktorat Lalu lintas dan Angkutan Laut minimal sekali dalam 6 bulan sebagai Prasyarat perpanjangan sertifikat.	*Shipowner's Representative is obliged to report to the Director General of Sea Transportation Cq. Directorate of Traffic and Sea Transport regarding their activities minimum every six (6) months as precondition for the renewal of this certificate.*

Foto yang bersangkutan,

Jakarta, ...

Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Director General of Sea Transportation
untuk beliau/*on behalf*
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Director of Sea Traffic and Transport

.....8)
.....9)
.....10)

CC: 1. Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja D.N;
2. Dirjen Binwasnaker;
3. Dirjen Pajak;
4. Dirjen Imigrasi;
5. Kadisnakertrans Setempat;
6. PT. .....3).

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 34

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan nama orang yang ditunjuk sebagai *Owner's Representative*
2)	Diisi dengan kebangsaan orang yang ditunjuk sebagai *Owner's Representative*
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut yang mengajukan *Certificate of Owner's Representative*
4)	Diisi dengan alamat kantor perusahaan angkutan laut yang mengajukan *Certificate of Owner's Representative*
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan angkutan laut yang mengajukan *Certificate of Owner's Representative*
6)	Diisi dengan nama perusahaan asing yang menunjuk *Owner's Representative*
7)	Diisi dengan tanggal berlakunya masa kerja orang yang ditunjuk sebagai *Owner's Representative*
8)	Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan *Certificate of Owner's Representative* (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
9)	Diisi dengan Pangkat/Golongan pejabat yang menerbitkan Surat PEMBERITAHUAN Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
10)	Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)

www.peraturan.go.id

Contoh 35

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus

.....1), ...2)

Yth. Kepada
..... 3)
Jl. ..... 4)

di
.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ....., bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri, dengan data sebagai berikut :

a.	Nama Kapal	: .....6)
b.	Nomor Pendaftaran	: .....7)
c.	Tipe	: .....8)
d.	Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT)	: .....9)
e.	Tenaga Penggerak (HP)	: .....10)
f.	Kapasitas Angkut	: .....11)
g.	Status Kepemilikan Kapal	: milik / sewa
h.	Pelabuhansinggah	: .....12)
i.	Urgensi	: .....13)
j.	Nomor dan Tanggal SIOPSUS	: .....14)
k.	Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal	: ..... 15)
l.	Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus periode sebelumnya	: .....16)

Untuk melengkapi laporan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
a. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
b. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya.

2. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ..... s.d. tanggal ..... 17)

3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. (.....) 18)
An. Penanggung Jawab

(.....) 19)

Tembusan :
Ketua Umum DPP INSA

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 35

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut/ gubernur/bupati/walikota)
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
6)	Diisi dengan nama kapal
7)	Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan *grosse tonage* dan *dead weight tonage*
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan *Horse Power* (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan pelabuhan yang akan disinggahi
13)	Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
14)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS perusahaan yang bersangkutan
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya
17)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
18)	Diisi dengan nama perusahaan
19)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

www.peraturan.go.id

Contoh 36

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus

..... 1),..... 2)

Kepada

Yth. Direktur Utama
PT..... 3)
Jl. ..... 4)

di
.....5)

1. Sesuai ketentuan Pasal..... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ....., dan menunjuk surat Saudara ..... Nomor ..... tanggal .... perihal Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal Saudara telah dicatat sebagai armada niaga nasional dan dioperasikan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur dengan data kapal sebagai berikut :

   a. Nama Kapal : .....6)
   b. Nomor Pendaftaran : .....7)
   c. Tipe : .....8)
   d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : .....9)
   e. Tenaga Penggerak (HP) : .....10)
   f. Kapasitas Angkut : .....11)
   g. Status Kepemilikan Kapal : milik / sewa
   h. Kode Trayek : .....12)
   i. Pelabuhan Pangkal : .....13)
   j. Route Trayek : .....14)
   k. Urgensi : .....15)
   l. Nomor dan Tanggal SIOPSUS : .....16)
   m. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal : .....17)
   n. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus periode sebelumnya : .....16)

3. Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur ini berlaku dari tanggal ..... sampai dengan ..... 19), selain itu saudara wajib memperhatikan:
   a. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritime serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
   b. Laporan realisasi perjalanan kapal (*voyage report*) per triwulan;
   c. Kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

4. Demikian disampaikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 20)

..... 21)
..... 22)

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan setempat.

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 36

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional
6)	Diisi dengan nama kapal
7)	Diisi dengan nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan *Horse power (HP)*
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan kode trayek yang telah ditetapkan
13)	Diisi dengan pelabuhan pangkal (*home base*)
14)	Diisi dengan urutan trayek disertai dengan jarak mil antar pelabuhan
15)	Diisi dengan jenis muatan/penumpang
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS perusahaan yang bersangkutan
17)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
18)	Diisi dengan nomor dan tanggal berlakunya penempatan pengoperasian kapal periode sebelumnya
19)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
20)	Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
21)	Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
22)	Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin

www.peraturan.go.id

Contoh 37

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Rencana Penambahan Pelabuhan Singgah Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus

.....1), ...2)

Kepada
Yth. ..... 3)
Jl. ..... 4)

di
.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ....., bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus dengan data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal : .....6)
   b. Nomor Pendaftaran : .....7)
   c. Tipe : .....8)
   d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : .....9)
   e. Tenaga Penggerak (HP) : .....10)
   f. Kapasitas Angkut : .....11)
   g. Status Kepemilikan Kapal : milik / sewa
   h. Pelabuhan singgah : .....12)
   i. Urgensi : .....13)
   j. Nomor dan Tanggal SIOPSUS : .....14)
   k. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal : .....15)
   l. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus periode sebelumnya : .....16)

   Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
   a. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
   b. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya.

2. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 1 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal..... s.d. tanggal ..... 17)

3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. (.....) 18)
An. Penanggung Jawab

(.....) 19)

Tembusan :
Ketua Umum DPP INSA

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 37

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut/ gubernur/bupati/walikota)
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
6)	Diisi dengan nama kapal
7)	Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan grosse tonage dan dead *weight tonage*
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan *Horse power* (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan pelabuhan yang akan disinggahi
13)	Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
14)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS perusahaan yang bersangkutan
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya
17)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
18)	Diisi dengan nama perusahaan
19)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

www.peraturan.go.id

Contoh 38

Nomor : ……..1), ……..2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Penambahan Pelabuhan Singgah Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus

Kepada
Yth. Direktur Utama PT……..3)
Jl. ……..4)

di

……..5)

1. Menunjuk surat Saudara Nomor ……..6) tanggal ……..7) perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ……..8) tanggal ……..9) perihal Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus Untuk Kapal ……..10).

6. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, kapal tersebut telah tercatat melakukan penambahan pelabuhan singgah ……..11).

7. Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan dengan surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor……..12) tanggal ……..13) perihal Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus Untuk Kapal ……..14).

4. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

…….. 15)
……..16)

…….. 17)
…….. 18)

Tembusan :
1. Dirjen Hubla;
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan setempat.

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN CONTOH 38

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nomor surat permohonan
7)	Diisi dengan tanggal surat permohonan
8)	Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
9)	Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
10)	Diisi dengan nama kapal
11)	Diisi dengan pelabuhan singgah
12)	Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
13)	Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur.
14)	Diisi dengan nama kapal
15)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
16)	Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
17)	Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
18)	Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin

www.peraturan.go.id

Contoh 39

Nomor : .....1), ...2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Rencana Penambahan Urgensi Muatan pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus.

Kepada
Yth. ..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

1. Sesuai ketentuan Pasal ....dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ....., bersama ini kami menyampaikan laporan rencana penambahan urgensi muatan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus dengan data sebagai berikut :

a.	Nama Kapal	: .....6)
b.	Nomor Pendaftaran	: .....7)
c.	Tipe	: .....8)
d.	Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT)	: .....9)
e.	Tenaga Penggerak (HP)	: .....10)
f.	Kapasitas Angkut	: .....11)
g.	Status Kepemilikan Kapal	: milik / sewa
h.	Jenis Muatan Umum yang dimuat	: .....12)
i.	Pelabuhan Asal	: .....13)
j.	Pelabuhan Tujuan	: .....14)
k.	Nomor dan Tanggal SIOPSUS	: .....15)
l.	Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal	: .....16)
m.	Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus periode sebelumnya	: .....17)

2. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. (.....18))
An. Penanggung Jawab

(.....19))

Tembusan :
Ketua Umum DPP INSA

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN CONTOH 39

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Persetujuan Mengangkut Jenis Muatan Barang Umum (*General Cargo*)
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang memberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Persetujuan Mengangkut Jenis Muatan Barang Umum *(General Cargo*)
6)	Diisi dengan nama kapal
7)	Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan grosse tonage dan dead *weight tonage*
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan *Horse Power* (HP)
11)	Diisi dengan kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan jenis muatan umum yang dimuat
13)	Diisi dengan pelabuhan asal
14)	Diisi dengan pelabuhan tujuan
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS perusahaan yang bersangkutan
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
17)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya
18)	Diisi dengan nama perusahaan
19)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

www.peraturan.go.id

Contoh 40

Nomor : ……..1), ……..2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Penambahan Urgensi Muatan

Kepada
Yth. Direktur Utama PT……..3)
Jl ……..4)

di
……..5)

1. Menunjuk surat Saudara Nomor ……6) tanggal ……7) perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan surat Dirjen Hubla Nomor ……8) tanggal ……9) perihal Pengoperasian Kapal Tramper Di Dalam Negeri Untuk Kapal ……10).

8. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, kapal tersebut telah tercatat melakukan penambahan urgensi muatan ……11).

9. Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan dengan surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ……12) tanggal ……13) perihal Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus untuk Kapal ……14).

4. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

…….. 16)
……..17)

……. 18)
…….. 19)

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan setempat.

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 40

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional
6)	Diisi dengan nomor surat permohonan
7)	Diisi dengan nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tanggal surat permohonan
9)	Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
10)	Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
11)	Diisi dengan nama kapal
12)	Diisi dengan penambahan urgensi muatan
13)	Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
14)	Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
15)	Diisi dengan nama kapal
16)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
17)	Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
18)	Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
19)	Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin

www.peraturan.go.id

Contoh 41

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Mengangkut Muatan Umum Atau Barang Milik Pihak Lain pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus

.....1), ...2)

Kepada

..... 3)
Jl. ..... 4)

di
.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ....., bersama ini kami mengajukan permohonan izin mengangkut muatan umum atau barang milik pihak lain pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus dengan data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal : .....6)
   b. Nomor Pendaftaran : .....7)
   c. Tipe : .....8)
   d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : .....9)
   e. Tenaga Penggerak (HP) : .....10)
   f. Kapasitas Angkut : .....11)
   g. Status Kepemilikan Kapal : milik / sewa
   h. Pelabuhansinggah : .....12)
   i. Urgensi : .....13)
   j. Nomor dan Tanggal SIOPSUS : .....14)
   k. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal : .....15)
   l. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus periode sebelumnya : .....16)

   Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
   a. Salinan SIOPSUS;
   b. Salinan Spesifikasi kapal/Surat Laut;
   c. Salinan Rencana Pengoperasian Kapal;
   d. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
   e. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya.

2. Rencana pelaksanaan pengangkutan ini diajukan untuk 1 (satu) kali jalan dari pelabuhan ..... ke pelabuhan ..... mulai tanggal ..... s.d .....17)

3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. (.....) 18)
An. Penanggung Jawab

(.....) 19)

Tembusan :
Ketua DPP INSA

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 41

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut/ gubernur/bupat/walikota)
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
6)	Diisi dengan nama kapal
7)	Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan *grosse tonage dan dead weight tonage*
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan *Horse Power* (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan pelabuhan yang akan disinggahi
13)	Diisi dengan jenis muatan/penumpang
14)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS perusahaan yang bersangkutan
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya
17)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
18)	Diisi dengan nama perusahaan
19)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

www.peraturan.go.id

Contoh 42

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Mengangkut Muatan Umum atau Barang Milik Pihak Lain pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Khusus

..... 1),..... 2)

Kepada

Yth. Direktur Utama PT..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

1. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ..... Pasal....., dan menunjuk surat Saudara ..... Nomor ..... tanggal ..... perihal permohonan izin mengangkut muatan umum atau barang milik pihak lain pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal Saudara diberikan Izin untuk mengangkut muatan umum atau barang milik pihak lain pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus dengan data kapal sebagai berikut :

   a. Nama Kapal : .....6)
   b. Nomor Pendaftaran : .....7)
   c. Tipe : .....8)
   d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : .....9)
   e. Tenaga Penggerak (HP) : .....10)
   f. Kapasitas Angkut : .....11)
   g. Status Kepemilikan Kapal : milik / sewa
   h. Kode Trayek : .....12)
   i. Pelabuhan Pangkal : .....13)
   j. Route Trayek : .....14)
   k. Urgensi : .....15)
   l. Nomor dan Tanggal SIOPSUS : .....16)
   m. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal : .....17)

3. izin mengangkut muatan umum atau barang milik pihak lain pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus ini diberikan untuk 1 (satu) kali jalan dari Pelabuhan ..... ke Pelabuhan ..... 18) dan berlaku dari tanggal..... sampai dengan ..... 19), dan Saudara harus memperhatikan :
   a. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritime serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku ;
   b. Laporan realisasi perjalanan kapal (*voyage report*) per triwulan;
   c. Kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

4. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 20)

..... 21)
..... 22)

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan Setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 42

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional
6)	Diisi dengan nama kapal
7)	Diisi dengan nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan *Horse power (HP)*
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan kode trayek yang telah ditetapkan
13)	Diisi dengan pelabuhan pangkal (*home base*)
14)	Diisi dengan urutan trayek disertai dengan jarak mil antar pelabuhan.
15)	Diisi dengan jenis muatan/penumpang
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS perusahaan yang bersangkutan
17)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
18)	Diisi dengan pelabuhan tujuan
19)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
20)	Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
21)	Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
22)	Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin

www.peraturan.go.id

Contoh 43

Nomor : ……1),……..…..2)
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing Untuk Kegiatan Angkutan Laut Khusus

Kepada
Yth. .....3)
.....4)

di

……. ……5)

Dengan hormat,

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ….. Tahun ……, bersama ini kami memyampaikan rencana Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) untuk kegiatan angkutan laut khusus, dengan data-data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal / *Voyage* : .....6)
   b. Bendera/*IMO Number* : .....7) / .....8)
   c. Ukuran (DWT/GT/HP) : .....9)
   d. Owner /Principal : .....10)
   e. Nomor dan tanggal SIUPAL/ SIOPSUS : ……..…..11)
   f. Status : .....12)
   g. Pelabuhan Singgah : .....13)
   h. Port Agent / *Sub Agent* : .....14)
   i. E T A / ETD : .....15)
   j. Kegiatan : ……..16)
   k. B/M : .....17)
   l. Pelabuhan Asal/Tujuan : .....18)
   m. Crew List/ Kebangsaan : .....19)

3. Untuk melengkapi pemberitahuan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
   a. Salinan surat penunjukan keagenan kapal atau surat perjanjian keagenan umum (*letter of appointment / agency agreement);*
   b. Salinan Perjalanan Kapal (*Sailing Schedule*);
   c. Salinan Sertifikat Pendaftaran Kapal;
   d. Salinan Sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kapal (ISSC/SSO/CSO);
   e. Salinan Ship's Particular / Spesifikasi kapal; *)
   f. Salinan Daftar Awak Kapal (*Crew List*);
   g. Salinan Daftar Penumpang (*Passenger List);*
   h. Salinan sertifikat terkait lainnya sesuai kegiatan kapal asing.

2. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. .....20)
An. Penanggung Jawab

(.....21)
.....22)

Tembusan :
Ketua Umum DPP INSA

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 43

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut yang mengajukan Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) untuk kegiatan angkutan laut khusus
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing
6)	Diisi dengan Nama Kapal
7)	Diisi dengan bendera Kapal
8)	Diisi dengan Nomor IMO
9)	Diisi dengan *dead weight tonage, grosse tonage, dan Horse Power*
10)	Diisi dengan status kepemilikan kapal/yang mewakili pemilik kapal (*principal*)
11)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS
12)	Diisi dengan status trayek tetap/tidak tetap
13)	Diisi dengan nama pelabuhan yang akan disinggahi di Indonesia.
14)	Diisi dengan nama perusahaan pelayaran yang ditunjuk agen umum mewakili kegiatannya di pelabuhan yang akan disinggahi di Indonesia
15)	Diisi dengan tanggal rencana kedatangan/keberangkatan kapal ke/dari pelabuhan di Indonesia
16)	Diisi dengan kegiatan kapal di pelabuhan dengan melampirkan salinan surat pendukung kegiatan dimaksud
17)	Diisi dengan bongkar/muat barang/jenis muatan di pelabuhan
18)	Diisi dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan kapal diluar negeri
19)	Diisi dengan daftar dan kebangsaan awak kapal
20)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut
21)	Diisi dengan nama direktur utama perusahaan angkutan laut
22)	Diisi dengan tanda tangan direktur utama perusahaan angkutan laut

www.peraturan.go.id

Contoh 44

Nomor : ……1),……..…..2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) Kegiatan Angkutan Laut Khusus

Kepada
Yth. .....3)
.....4)
Di
…….5)

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Permenhub Nomor PM ….. Tahun ……. dan surat Saudara Nomor …..6), tanggal ……. 7), bersama ini disampaikan rencana kedatangan/keberangkatan kapal yang saudara ageni sebagai berikut :
   a. Nama Kapal/*Voyage* : .....8)
   b. Bendera/*IMO Number* : .....9) / .....10)
   c. Ukuran (DWT/GT/HP) : .....11)
   d. *Owner / Principal* : .....12)
   e. Nomor dan tanggal SIOPSUS : ……13)
   f. Status : .....14)
   g. Pelabuhan Singgah : .....15)
   h. Port Agent / *Sub Agent* : .....16)
   i. E T A / ETD : .....17)
   j. Kegiatan : ……18)
   k. B/M : .....19)
   l. Pelabuhan Asal/Tujuan : .....20)
   m. *Crew List*/ Kebangsaan : .....21)
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, dengan ini disetujui bahwa rencana kedatangan/keberangkatan kapal asing yang diageni perusahaan Saudara telah memenuhi persyaratan dan telah dicatat dalam daftar kapal keagenan asing di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional;
   b. Mengurus kepentingan kapal asing yang diageni dan bertanggung jawab atas biaya kapal selama berada di pelabuhan Indonesia;
   c. Dilarang untuk mengangkut muatan dan/atau penumpang antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia *(azas cabotage)* serta melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Permenhub Nomor PM 10 Tahun 2014 Jo Permenhub Nomor PM 200 Tahun 2015;
   d. Surat ini hanya berlaku sebagai Laporan Keagenan Kapal Asing (PKKA) bagi kapal asing yang melakukan kegiatan di pelabuhan atau terminal kthusus di Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri di wilayah perairan Republik Indonesia;
   e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dilakukan pemilik barang dengan pengangkut;
   f. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap kapal-kapal asing yang menyinggahi pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang belum *comply* dengan ketentuan SOLAS 1974 Chapter XI-2 (ISPS Code 2002);
   g. Melaporkan realisasi kegiatan keagenan kapal asing setiap 3 (tiga) bulan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....22)

(.....23)
.....24)
NIP.....25)

Tembusan :
1. Dirjen Hubla;
2. Dirjen Imigrasi;
3. Deputi V BIN TNI;
3. ASOPS KSAL;
5. Kepala BAIS TNI;
6. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
7. BUP setempat .....;
8. Ketua DPP INSA.

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 44

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat Laporan Keagenan Kapal Asing (LKKA) untuk kegiatan angkutan laut khusus
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan nama direktur perusahaan angkutan laut
4)	Diisi dengan alamat kantor perusahaan angkutan laut
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan angkutan laut
6)	Diisi dengan nomor surat perusahaan angkutan laut
7)	Diisi dengan tanggal surat perusahaan angktan laut
8)	Diisi dengan nama kapal
9)	Diisi dengan bendera Kapal
10)	Diisi dengan Nomor IMO
11)	Diisi dengan *Dead Weight Tonage, Grosse Tonage, dan Horse Power*
12)	Diisi dengan status kepemilikan kapal/yang mewakili pemilik kapal (*principal*)
13)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS
14)	Diisi dengan status trayek tetap/tidak tetap
15)	Diisi dengan nama pelabuhan yang akan disinggahi di Indonesia
16)	Diisi dengan nama perusahaan pelayaran yang ditunjuk agen umum mewakili kegiatannya di pelabuhan yang akan disinggahi di Indonesia
17)	Diisi dengan tanggal kedatangan/keberangkatan kapal ke/dari pelabuhan di Indonesia
18)	Diisi dengan kegiatan kapal di pelabuhan
19)	Diisi dengan bongkar/muat barang/jenis muatan di pelabuhan
20)	Diisi dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan kapal diluar negeri
21)	Diisi dengan daftar dan kebangsaan awak kapal
22)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Laporan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
23)	Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Laporan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
24)	Diisi dengan Pangkat/Golongan pejabat yang menerbitkan Surat Laporan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
25)	Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Laporan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
26)	Diisi dengan Kepala OP / UPP / Kabid lala & Kepelabuhanan yang bersangkutan

www.peraturan.go.id

Contoh 45

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.

.....1), ...2)

Kepada
Yth. ..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ....., bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal pelra dengan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :

a.	Nama Kapal	: .....6)
b.	Tipe	: .....7)
c.	Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT)	: .....8)
d.	Tenaga Penggerak (HP)	: .....9)
e.	Kapasitas Angkut	: .....10)
f.	StatusKepemilikan Kapal	: milik / sewa
g.	Kode Trayek	: .....11)
h.	Pelabuhan Pangkal	: .....12)
i.	Route Trayek	: .....13)
j.	Urgensi	: .....14)
k.	Nomor dan Tanggal SIUPER	: .....15)
l.	Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Periode sebelumnya	: .....16)

Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
a. Salinan SIUPER;
b. Rencana jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal;
c. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
d. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya;
e. Salinan Rencana Pengoperasian Kapal.

2. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ..... s.d. tanggal ..... 17)

3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. (.....) 18)
An. Penanggung Jawab

(.....) 19)

Tembusan :
Ketua Umum DPP PELRA

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 45

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan pelayaran rakyat
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (gubernur/bupati/walikota).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (gubernur/bupati/walikota)
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (gubernur/bupati/walikota)
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan tipe kapal (kapal layar, kapal layar motor, atau kapal motor)
8)	Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage
9)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal (PK/HP)
10)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
11)	Diisi dengan kode trayek yang telah ditetapkan
12)	Diisi dengan pelabuhan pangkal (home base)
13)	Diisi dengan urutan trayek disertai dengan jarak mil antar pelabuhan.
14)	Diisi dengan jenis muatan/penumpang
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPER perusahaan yang bersangkutan
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal penempatan pengoperasian kapal periode sebelumnya
17)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
18)	Diisi dengan nama perusahaan
19)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

www.peraturan.go.id

Contoh 46

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri

..... 1),..... 2)

Kepada
Yth. Direktur Utama PT..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

1. Sesuai dengan Pasal .... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ....., dan menunjuk surat Saudara ..... Nomor ..... tanggal ..... perihal Laporan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal Saudara telah dicatat sebagai armada pelayaran rakyat nasional dan dioperasikan pada trayek tetap dan teratur dengan data kapal sebagai berikut :

   a. Nama Kapal : .....6)
   b. Tipe : .....7)
   c. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : .....8)
   d. Tenaga Penggerak (HP) : .....9)
   e. Kapasitas Angkut : .....10)
   f. StatusKepemilikan Kapal : milik / sewa
   g. Kode Trayek : .....11)
   h. Pelabuhan Pangkal : .....12)
   i. Route Trayek : .....13)
   j. Urgensi : .....14)
   k. Nomor dan Tanggal SIUPER : .....15)

   m. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Periode sebelumnya : .....16)

3. Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tetap dan Teratur ini berlaku dari tanggal..... sampai dengan ..... 17). Apabila kapal yang dioperasikan tidak menyinggahi pelabuhan ..... secara tetap dan teratur dengan berjadwal, maka akan diperlakukan sebagai kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur pelayaran rakyat, selain itu saudara wajib memperhatikan :
   a. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim serta peraturan perundang-undangan lainnya;
   b. Laporan realisasi perjalanan kapal (*voyage report*) per triwulan;
   c. Kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

4. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 20)

..... 21)
..... 22)

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan Setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat.

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 46

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (gubernur/bupati/walikota)
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional
6)	Diisi dengan nama kapal
7)	Diisi dengan tipe kapal (kapal layar, kapal layar motor, atau kapal motor)
8)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
9)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal (PK/HP)
10)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
11)	Diisi dengan kode trayek yang telah ditetapkan
12)	Diisi dengan pelabuhan pangkal (*home base*)
13)	Diisi dengan urutan trayek disertai dengan jarak mil antar pelabuhan
14)	Diisi dengan jenis muatan/penumpang
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPER perusahaan yang bersangkutan
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal berlakunya penempatan pengoperasian kapal periode sebelumnya
17)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
18)	Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
19)	Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
20)	Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin

www.peraturan.go.id

Contoh 47

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri

.....1), ...2)

Yth. Kepada
..... 3)
Jl. .....4)

di

.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ....., bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal pelra pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal : .....6)
   b. Tipe : .....7)
   c. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : .....8)
   d. Tenaga Penggerak (HP) : .....9)
   e. Kapasitas Angkut : .....10)
   f. Status Kepemilikan Kapal : milik / sewa
   g. Pelabuhansinggah : .....11)
   h. Urgensi : .....12)
   i. Nomor dan Tanggal SIUPER : .....13)

   j. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya : .....14)

   Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
   a. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
   b. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya.

2. Rencana pengoperasian kapal pelra ini diajukan untuk3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ..... s.d. tanggal ..... 15)

3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. (.....) 16)
An. Penanggung Jawab

(.....) 17)

Tembusan :
Ketua Umum DPP PELRA

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 47

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan pelayaran rakyat
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (gubernur/bupati/walikota)
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (ubernur/bupati/walikota)
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (gubernur/bupati/walikota)
6)	Diisi dengan nama kapal
7)	Diisi dengan tipe kapal (kapal layar, kapal layar motor, atau kapal motor)
8)	Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage
9)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal (PK/HP)
10)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
11)	Diisi dengan pelabuhan yang akan disinggahi
12)	Diisi dengan jenis muatan/penumpang
13)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPER perusahaan yang bersangkutan
14)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya
15)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
16)	Diisi dengan nama perusahaan
17)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

www.peraturan.go.id

Contoh 48

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri

.....1), ...2)

Kepada
Yth. PT ..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ....., bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal pelra pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :

   a. Nama Kapal : .....6)
   b. Tipe : .....7)
   c. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : .....8)
   d. Tenaga Penggerak (HP) : .....9)
   e. Kapasitas Angkut : .....10)
   f. Status Kepemilikan Kapal : milik / sewa
   g. Pelabuhansinggah : .....11)
   h. Urgensi : .....12)
   i. Nomor dan Tanggal SIUPER : .....13)
   k. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya : .....14)

2. Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut:
   a. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
   b. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya.

3. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ..... s.d. tanggal ..... 15)

4. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

..... 16)

..... 17)
..... 18)

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Kepala Kantor Syahbandar Setempat;
3. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Setempat;
4. Pimpinan Badan Usaha Pelabuhan Setempat.

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 48

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (gubernur/bupati/walikota)
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional
6)	Diisi dengan nama kapal
7)	Diisi dengan tipe kapal
8)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
9)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan *Horse Power* (HP)
10)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
11)	Diisi dengan pelabuhan singgah
12)	Diisi dengan urgensi
13)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPER perusahaan yang bersangkutan
14)	Diisi dengan nomor dan tanggal berlakunya penempatan pengoperasian kapal periode sebelumnya
15)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
16)	Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
17)	Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
18)	Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin

www.peraturan.go.id

Contoh 49

LAPORAN REALISASI PERJALANAN KAPAL (*VOYAGE REPORT*)

Nama Perusahaan Pelayaran Rakyat :
Alamat Perusahaan :
T e l e p o n :
Periode Laporan :
Status Trayek : Liner/Tramper *)

Nama Kapal :
Bendera /Status Kapal :
Type/Ukuran Kapal :
Kecepatan Ekonomis :

Pelabuhan Asal	Tiba		Berangkat		Jarak Mil	Waktu Berlayar		Waktu Berlabuh		Bongkar Muat		Waktu Yang di Perlukan	Pelabuhan Tujuan	Pemuatan/Pemberangkatan						
	Tgl	Jam	Tgl	Jam		Hari	Jam	Hari	Jam	Mulai	Selesai			B/M	Ton 1000 Kg	Ukuran (M3)	Penum-pang	Hewan	Jenis Barang	Kemasan
1	2	3	4	5	6	7	8	s 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

CATATAN:
Keterlambatan handling oleh karena muatan, menunggu tongkang/truck, kerusakan kapal dsd.
Diperlukan : ..... karena .....
Dilaut (karena cuaca, kerusakan mesin dsb) .....

..... , ...20 ...
PT. .....

(.....)

II. DAFTAR JENIS MUATAN

1. Beras	17. Minyak Goreng	32. Barang Kerajinan	48. Kaolin	64. Ikan Asia
2. Gula Pasir	18. Sayur-sayuran	33. Soda ash	49. Nikel	65. Rumput Laut
3. Gandum	19. Buah-buahan	34. Zat asam	50. Alumunium	66. Hasil Laut Lainnya
4. Tepung Terigu	20. Kapas	35. Mesin-mesin	51. Batubara	67. Sapi
5. Kedelai	21. Hasil Pertanian dan	36. Makanan Ternak	52. Pasir Kwarsa	68. Kerbau
6. Kacang-kacangan	Perkebunan lainnya	37. Baja/Besi Beton	53. Pasir Besi	69. Kulit Hewan
7. Lada	22. Pupuk	38. Kertas	54. Pasir Lain	70. Kulit TernakLainnya
8. Cengkeh	23. Semen	39. Makanan/Minuman	55. Klinker	Penumpang Umum
9. Rempah-rempah	24. Garmen	40. Hasil Perindustrian lainnya	56. Hasil Pertambangan	71. Transmigrasi
10. Kopi	25. Tekstil	41. Crude Oil	57. Logos	72. Turis
11. Tembakau	26. Elektronik	42. Bahan Bakar Minyak	58. Kayu Gergaji	73. TKI
12. Kakao	27. Gaplek	43. Gas/LNG	59. Kayu Lapis	74. Lain-lain
13. Teh	28. Kedaraan	44. Aspal	60. Rotan	
14. Karet	29. Furniture	45. Timah	61. Hasil Hutan Lainnya	
15. Kopra	30. Garam	46. Bauksit	62. Ikan	
16. Minyak Sawit	31. Bahan Kimia	47. Tembaga	63. Udang	

III. DAFTAR JENIS KEMASAN

1. Bag. (pak/karung)	5. Drum	9. *Dry Bulk*
2. *Case* (Peti)	6. *Pallet*	10. *Liquid Bulk*
3. Bale (bal/bundal)	7. Peti kemas	11. lain-lain
4. Barel (Kaleng)	8. *Barge*	

III. DAFTAR TYPE KAPAL

1. Konvensional	5. Tongkang	9. *Bulk* (curah)	13.Kapal Layar (1)
2. *Container* (Petikemas)	6. Roro	10. Tanker	14.Kapal layar Motor (1)
3. Semi *Container* (Petikemas)	7. Tunda	11. *Lash*	15.Kapal Motor (1)
4. *Landing Craft*	8. Penumpang	12. Ikan	16.Lain-lain

www.peraturan.go.id

Contoh 50

LAPORAN BULANAN KEGIATAN KUNJUNGAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT

DI PELABUHAN .....

PT. PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT (PUSAT/CABANG)*)

JALAN : .....
TELEPON : .....

BULAN : .....

NO	NAMA KAPAL	DATANG		BONGKAR TON/M3	JENIS BARANG	BERANGKAT		MUAT TON/M3	JENIS BARANG	STATUS TRAYEK(*)	STATUS KAPAL(M/C/K) *)
		TGL	DARI PELAB.			TGL	KE PELAB.				

*) Coret yang tidak perlu

..... tanggal .....

GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA

.....

L : Liner
T : Tramper
M : Milik
C : Charter
K : Keagenan

www.peraturan.go.id

Contoh 51

.....1)

.....2)

Nomor : ..... 3)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)

..... 4), ...5)

Kepada

Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44

di

JAKARTA

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM .... Tahun ...., bersama ini kami mengajukan Permohonan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :
   a. Akte Pendirian Perusahaan Pelayaran oleh Notaris yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
   b. Bukti Pemilikan 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut (Grosse Akte, Surat Ukur dan Sertifikat Keselamatan) yang masih berlaku;
   c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar dari Ditjen Pajak;
   d. Fotokopi Ijazah Tenaga Ahli Setingkat Diploma III di Bidang Pelayaran Niaga yang dilegalisir;
   e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
   f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan;
   g. Pakta Integritas;
   h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
3. Adapun rencana pengoperasian kapal yang kami miliki adalah dalam rangka Angkutan Laut.
4. Demikian permohonan kami, jika diterima, kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang Angkutan Laut.

Hormat kami,
PT. .....6)

..... 7)
..... 8)

Tembusan:
Dirjen Hubla

www.peraturan.go.id

Contoh 51a

.....1)

.....2)

Nomor : ..... 3) ..... 4), ...5)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)

Kepada
Yth. Gubernur....
di
.....

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ....., bersama ini kami mengajukan Permohonan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :
   a. Akte Pendirian Perusahaan Pelayaran dari Notaris yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
   b. Bukti Pemilikan 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut (Grosse Akte, Surat Ukur dan Sertifikat Keselamatan) yang masih berlaku;
   c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar dari Ditjen Pajak;
   d. Fotokopi Ijazah Tenaga Ahli Setingkat Diploma III di Bidang Pelayaran Niaga yang dilegalisir;
   e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
   f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan;
   g. Pakta Integritas;
   h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
3. Adapun rencana pengoperasian kapal yang kami miliki adalah dalam rangka Angkutan Laut.
4. Demikian permohonan kami, jika diterima, kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Angkutan Laut.

Hormat kami,
PT. ..... 6)

Tembusan:
Dirjen Hubla

..... 7)
..... 8)

www.peraturan.go.id

Contoh 51b

.....1)

.....2)

Nomor : ..... 3) ..... 4), ...5)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)

Kepada
Yth. Bupati/Walikota.....
di
.....

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ....., bersama ini kami mengajukan Permohonan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).

2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :
   a. Akte Pendirian Perusahaan Pelayaran dari Notaris yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
   b. Bukti Pemilikan 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut (Grosse Akte, Surat Ukur dan Sertifikat Keselamatan) yang masih berlaku;
   c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar dari Ditjen Pajak;
   d. Fotokopi Ijazah Tenaga Ahli Setingkat Diploma III di Bidang Pelayaran Niaga yang dilegalisir;
   e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
   f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan;
   g. Pakta Integritas;
   h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

3. Adapun rencana pengoperasian kapal yang kami miliki adalah dalam rangka Angkutan Laut.

4. Demikian permohonan kami, jika diterima, kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang Angkutan Laut.

Hormat kami,

PT. ..... 6)

..... 7)
..... 8)

Tembusan:
Dirjen HUbla

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 51, 51a, 51b

NO	URAIAN
1)	Diisi dengan kop surat perusahaan dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte perusahaan yang telah mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2)	Diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang sesuai dengan surat keterangan domisili perusahaan disertai dengan nomor telepon dan faksimilie
3)	Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan
4)	Diisi dengan nama kota tempat perusahaan berdomisili
5)	Diisi dengan tanggal surat permohonan perusahaan
6)	Diisi dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
7)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan
8)	Diisi dengan nama jabatan penanggung jawab perusahaan

www.peraturan.go.id

Contoh 51c

Nomor : ……..1) Jakarta, ……..2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian Berkas Permohonan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut

Kepada

Yth. Direktur Utama
PT. .....3)
Jl. .....4)

di

.....5)

1. Menunjuk surat Saudara Nomor.....6) tanggal .....7) perihal Permohonan Surat Izin Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).

2. Sehubungan butir 1 (satu) diatas, bersama ini diberitahukan bahwa surat permohonan saudara telah diterima dan untuk proses selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ... yaitu:
   a. ……. 8)
   b. …….

3. Permohonan Saudara dapat diproses lebih lanjut apabila kelengkapan dimaksud segera dipenuhi.

4. Demikian disampaikan untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

..... 9)
.....10)

Tembusan :
Dirjen Hubla

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 51c

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan nomor surat pengembalian berkas permohonan SIUPAL oleh Kepala BKPM kepada Pemohon
2)	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat pengembalian berkas permohonan SIUPAL oleh Kepala BKPM kepada Pemohon permohonan perusahaan pemohon izin usaha
3)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon izin usaha angkutan laut
4)	Diisi dengan alamat kantor perusahaan pemohon izin usaha angkutan laut
5)	Diisi dengan nama Kota domisili perusahaan
6)	Diisi dengan Nomor surat permohonan SIUPAL
7)	Diisi dengan tanggal permohonan SIUPAL oleh Pemohon
8)	Diisi dengan alasan pengembalian berkas permohonan
9)	Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani izin
10)	Diisi dengan pangkat dan golongan pejabat yang berwenang menandatangani izin

www.peraturan.go.id

Contoh 51d

Nomor : ……..1) Jakarta,……..2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian Berkas Permohonan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut

Kepada
Yth. Direktur Utama
PT. .....3)
.....4)

di
.....5)

1. Menunjuk surat Saudara Nomor .....6) tanggal .....7) perihal Permohonan Surat Izin Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).

2. Sehubungan butir 1 (satu) diatas, bersama ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Saudara telah diterima dan untuk proses selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... tahun ... yaitu:
   a. ……. 8)
   b. ……..

3. Permohonan Saudara dapat diproses lebih lanjut apabila kelengkapan dimaksud segera dipenuhi.

4. Demikian disampaikan untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Gubernur/Bupati/Walikota ..... 9)

..... 10)
.....11)

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 51d

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan nomor surat pengembalian berkas permohonan SIUPAL oleh gubernur atau bupati/walikota kepada Pemohon
2)	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat pengembalian berkas permohonan SIUPAL oleh gubernur atau bupati/walikota kepada Pemohon permohonan perusahaan pemohon izin usaha
3)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon izin usaha angkutan laut
4)	Diisi dengan alamat kantor perusahaan pemohon izin usaha angkutan laut
5)	Diisi dengan nama Kota domisili perusahaan
6)	Diisi dengan Nomor surat permohonan SIUPAL
7)	Diisi dengan tanggal permohonan SIUPAL oleh Pemohon
8)	Diisi dengan alasan pengembalian berkas permohonan
9)	Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani izin
10)	Diisi dengan pangkat dan golongan pejabat yang berwenang menandatangani izin

www.peraturan.go.id

Contoh 52

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut

....., ...20.....

Kepada

Yth. Kepala BKPM

di

JAKARTA

1. Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal ....., dan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... tahun ... , bersama ini kami sampaikan bahwa telah dilakukan evaluasi pemenuhan persyaratan teknis, dengan hasil sebagai berikut :

   a. Kepemilikan Modal usaha telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi;

   b. Telah dilaksanakan pemeriksaan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis pada tanggal ..... bertempat di ..... yang dituangkan dalam Berita Acara terlampir.

2. Dengan telah terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, dapat direkomendasikan kepada PT..... untuk penerbitan izin usaha perusahaan angkutan laut.

3. Demikian disampaikan untuk proses lanjut, atas perhatian dan kerjasamnya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

.....

Tembusan:
.....

www.peraturan.go.id

Contoh 53

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Jl. .....

SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL)

(Berdasarkan PP No.20 Tahun 2010 Jo. PP No.22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan dan Permenhub No. PM 93 Tahun 2013 Jo Permenhub No. PM ..Tahun... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut)

Nomor : ..... 1)

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor .....2) tanggal.....3) diberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) kepada :

Nama Perusahaan	:	.....4)
Alamat Kantor Perusahaan	:	.....5)
Nama Direktur Utama/Penanggung Jawab	:	.....6)
Alamat Direktur Utama/Penanggung Jawab	:	.....7)
Nomor Pokok Wajib Pajak	:	.....8)
Nilai Modal Perusahaan	:	.....9)
Status Perusahaan	:	.....10)

Kewajiban Pemegang SIUPAL :
1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan dan perlindungan lingkungan maritim serta peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi/Komisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.
4. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUPAL ini.
5. Mengumumkan jadual baik untuk pelayaran tetap dan teratur atau liner maupun pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur atau tramper melalui media massa ataupun organisasi yang mempertemukan kepentingan pengguna dan penyedia jasa angkutan laut.
6. Menyampaikan laporan tahunan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
7. Menyampaikan laporan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
8. Menyampaikan laporan kinerja keuangan perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
9. Menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna/calon perwira yang akan melaksanakan praktek berlayar (Proyek Laut), bagi kapal yang berukuran GT. 750 ke atas.
10. Menyediakan ruangan untuk angkutan pos.

SIUPAL ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin usaha secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Izin Usaha ini berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : .....11)

Penanggung Jawab

..... 14)
..... 15)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

.....12)
..... 13)

www.peraturan.go.id

Contoh 53a

PEMERINTAH PROVINSI ……….
Jl.....

SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL)

(Berdasarkan PP No.20 Tahun 2010 Jo. PP No.22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan dan Permenhub No. PM 93 Tahun 2013 Jo Permenhub No. PM ...Tahun... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut)

NOMOR : ..... 1)

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor .....2) tanggal .....3) diberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) kepada :

Nama Perusahaan	:	.....4)
Alamat Kantor Perusahaan	:	.....5)
Nama Direktur Utama / Penanggung Jawab	:	.....6)
Alamat Direktur Utama / Penanggung Jawab	:	.....7)
Nomor Pokok Wajib Pajak	:	.....8)
Nilai Modal Perusahaan	:	.....9)
Status Perusahaan	:	.....10)

Kewajiban Pemegang SIUPAL :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan dan perlindungan lingkungan maritim serta peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi/Komisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.
4. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUPAL ini.
5. Mengumumkan jadual baik untuk pelayaran tetap dan teratur atau liner maupun pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur atau tramper melalui media massa ataupun organisasi yang mempertemukan kepentingan pengguna dan penyedia jasa angkutan laut.
6. Menyampaikan laporan tahunan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
7. Menyampaikan laporan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
8. Menyampaikan laporan kinerja keuangan perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
9. Menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna/calon perwira yang akan melaksanakan praktek berlayar (Proyek Laut), bagi kapal yang berukuran GT. 750 ke atas.
10. Menyediakan ruangan untuk angkutan pos.

SIUPAL ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin usaha secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Izin Usaha ini berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan di : .....
pada tanggal : .....11)

Penanggung Jawab

..... 14)
..... 15)

GUBERNUR.....

.....12)
..... 13)

www.peraturan.go.id

Contoh 53b

PEMERINTAH KABUPATEN ..... /KOTA……
Jl. .....

SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL)

(Berdasarkan PP No.20 Tahun 2010 Jo. PP No.22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan dan Permenhub No. PM 93 Tahun 2013 Jo Permenhub No. PM ....Tahun..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut)

NOMOR : ..... 1)

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor .....2) tanggal .....3) diberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) kepada :

Nama Perusahaan : .....4)
Alamat Kantor Perusahaan : .....5)

Nama Direktur Utama / Penanggung Jawab : .....6)
Alamat Direktur Utama / Penanggung Jawab : .....7)

Nomor Pokok Wajib Pajak : .....8)
Nilai Modal Perusahaan : .....9)
Status Perusahaan : .....10)

Kewajiban Pemegang SIUPAL :
1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan dan perlindungan lingkungan maritim serta peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi/Komisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.
4. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUPAL ini.
5. Mengumumkan jadual baik untuk pelayaran tetap dan teratur atau liner maupun pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur atau tramper melalui media massa ataupun organisasi yang mempertemukan kepentingan pengguna dan penyedia jasa angkutan laut.
6. Menyampaikan laporan tahunan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
7. Menyampaikan laporan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
8. Menyampaikan laporan kinerja keuangan perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
9. Menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna/calon perwira yang akan melaksanakan praktek berlayar (Proyek Laut), bagi kapal yang berukuran GT. 750 ke atas.
10. Menyediakan ruangan untuk angkutan pos.

SIUPAL ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin usaha secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Izin Usaha ini berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan di : .....
pada tanggal : .....11)

Penanggung Jawab

..... 14)
..... 15)

BUPATI/WALIKOTA.....

.....12)
..... 13)

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 53, 53a, DAN 53b

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan nomor ditandatanganinya surat izin usaha
2)	Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan pemohon izin usaha
3)	Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohon izin usaha
4)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon izin usaha.
5)	Diisi dengan alamat domisili kantor perusahaan pemohon izin usaha
6)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan pemohon izin usaha
7)	Diisi dengan alamat penanggung jawab perusahaan pemohon izin usaha
8)	Diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan pemohon izin usaha
9)	Diisi dengan nilai modal dasar perusahaan pemohon izin usaha
10)	Diisi dengan status perusahaan pemohon izin usaha (PMDN/PMA)
11)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat izin usaha
12)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
13)	Diisi dengan pangkat/golongan/Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
14)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan
15)	Diisi dengan jabatan penanggung jawab perusahaan

www.peraturan.go.id

Contoh 54

Nomor : ……..1)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Penundaan Perubahan Status Perusahaan (*Joint Venture*)

Jakarta, ... ……..2)

Kepada

Yth. Direktur Utama
PT. .....3)
.....4)

di

..... 5)

1. Menunjuk surat Saudara No. .....6) tanggal .....7) perihal Permohonan Perubahan Status Perusahaan Pada Surat Izin Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, bersama ini diberitahukan bahwa surat permohonan Saudara telah diterima dan untuk proses selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ..... yaitu:

   a. ……. 8)
   b. …….

3. Permohonan Saudara dapat diproses lebih lanjut apabila kelengkapan dimaksud segera dipenuhi.

4. Demikian disampaikan untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

..... 9)
.....10)

Tembusan :
1. Dirjen Hubla;
2. Kasubbag TU Ditlala.

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 54

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan nomor ditandatanganinya surat penundaan izin usaha
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat penundaan izin usaha
3)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon izin usaha
4)	Diisi dengan alamat perusahaan pemohon izin usaha
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan pemohon izin usaha
6)	Diisi dengan nomor permohonan perusahaan pemohon izin usaha
7)	Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohon izin usaha
8)	Diisi dengan kekurangan persyaratan yang harus dilampirkan perusahaan pemohon izin usaha
9)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
10)	Diisi dengan pangkat/golongan/Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani

www.peraturan.go.id

Contoh 55

Nomor : ……..1), ……..2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Surat Keterangan Perubahan Status Perusahaan.

Kepada

Yth. Direktur Utama
PT. ……. 3)
Jl. ……4)

di

……..5)

1 Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ……..6) tanggal ……..7), perihal Permohonan Perubahan/Pengalihan SIUPAL, bersama ini terlampir disampaikan Surat Keterangan tentang Perubahan status Perusahaan pada SIUPAL PT……. 8)

2. Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

……..9)

……..10)
……..11)
……..12)

Tembusan :
1. Dirjen Hubla;
1. Sesditjen Hubla;
2. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan/ KSOP/UPP/Kepala Kantor Pelabuhan ……13)

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 55

NO	URAIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (gubernur/bupati/walikota)
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat penundaan izin usaha
3)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon izin usaha
4)	Diisi dengan alamat perusahaan pemohon izin usaha
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan pemohon perubahan status perusahaan
6)	Diisi dengan nomor permohonan perusahaan pemohon perubahan status perusahaan
7)	Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohon perubahan status perusahaan
8)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon perubahan status perusahaan
9)	Diisi dengan nama jabatan pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
10)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
11)	Diisi dengan pangkat/golongan pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
12)	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
13)	Diisi dengan domisili Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat

www.peraturan.go.id

Contoh 56

SURAT KETERANGAN
Nomor :

1. Berdasarkan surat PT. ……1) Nomor ……2) tanggal ……3), perihal Permohonan Perubahan Status Perusahaan, sesuai Akta Perubahan Nomor ……..4) tanggal……5), Notaris ……6) di ……7), serta Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan dari Perusahaan Non Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri (Non PMA/PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing Nomor……8) tanggal ……9), dengan ini diadakan Perubahan Status Perusahaan sebagai berikut :

Nama Perusahaan	:	……10)
Nomor & Tgl. SIUPAL	:	……11)
Domisili Perusahaan	:	……12)
Penanggung Jawab dan Jabatan Lama	:	……13)
Penanggung Jawab dan Jabatan Baru	:	……14)
Alamat Penanggung Jawab	:	……15)
Status Perusahaan Lama	:	……16)
Status Perusahaan Baru	:	……17)

2. Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) PT. ……1) No……18) tanggal….19), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan dan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM……Tahun …… tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

3. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, ……..

……(20)

……(21)
……(22)
……(23)

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 56

NO	URAIAN
1)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon perubahan status perusahaan
2)	Diisi dengan nomor permohonan perusahaan pemohon perubahan status perusahaan
3)	Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohon perubahan status perusahaan
4)	Diisi dengan nomor Akte Perubahan dari Notaris
5)	Diisi dengan tanggal akte perubahan dari Notaris
6)	Diisi dengan nama Notaris yang menerbitkan Akte Perubahan
7)	Diisi dengan domisili Notaris
8)	Diisi dengan nomor surat persetujuan yang menerangkan perubahan status perusahaan.
9)	Diisi dengan tanggal surat persetujuan yang menerangkan perubahan status perusahaan.
10)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon perubahan status perusahaan
11)	Diisi dengan nomor dan tanggal izin usaha perusahaan pemohon perubahan status perusahaan.
12)	Diisi dengan domisili perusahaan pemohon perubahan status perusahaan
13)	Diisi dengan nama penanggung jawab lama dan jabatannya
14)	Diisi dengan nama penanggung jawab baru dan jabatannya
15)	Diisi dengan alamat penanggung jawab baru
16)	Diisi dengan status perusahaan lama
17)	Diisi dengan status perusahaan baru
18)	Diisi dengan nomor izin usaha perusahaan pemohon perubahan status perusahaan
19)	Diisi dengan tanggal izin usaha perusahaan pemohon perubahan status perusahaan
20)	Diisi dengan nama jabatan pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
21)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
22)	Diisi dengan pangkat/golongan pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
23)	Diisi dengan pangkat/golongan pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani

www.peraturan.go.id

Contoh 57

.....1)
.....2)

Nomor : ..... 3) ..... 4), ...5)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran-Rakyat (SIUPER)

Kepada
Yth. Gubernur/Bupati/Walikota
Jl. .....
di
JAKARTA

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ....., bersama ini kami mengajukan Permohonan Surat Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPER).

2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :

   a. Akte Pendirian Perusahaan Pelayaran dari Notaris yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia;
   b. Bukti Pemilikan 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut (Grosse Akte, Surat Ukur dan Sertifikat Keselamatan) yang masih berlaku;
   c. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar dari Ditjen Pajak;
   d. Foto Copy Ijazah Tenaga Ahli Setingkat Diploma III di Bidang Pelayaran Niaga yang dilegalisir;
   e. Keterangan Domisili Perusahaan;
   f. Foto Copy KTP Dirut / Penanggung Jawab Perusahaan.
   g. Pakta Integritas;
   h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

3. Adapun rencana pengoperasian kapal yang kami miliki adalah dalam rangka Angkutan Laut.

4. Demikian permohonan kami, jika diterima, kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang Angkutan Laut.

Hormat kami,

PT. ..... 6)

Tembusan :
1. Menhub RI
2. Dirjen Hubla
3. DPP Pelra

..... 7)
..... 8)

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 57

NO	URAIAN
1)	Diisi dengan kop surat perusahaan dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte perusahaan yang telah mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM
2)	Diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang sesuai dengan surat keterangan domisili perusahaan disertai dengan nomor telepon dan faksimilie
3)	Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan
4)	Diisi dengan nama kota tempat perusahaan berdomisili
5)	Diisi dengan tanggal surat permohonan perusahaan.
6)	Diisi dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte perusahaan yang telah disahkan oleh Kemenkumham
7)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan
8)	Diisi dengan nama jabatan penanggung jawab perusahaan

www.peraturan.go.id

Contoh 58

Nomor : ……..1)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Penundaan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat (SIUPER)

Jakarta, ……..2)

Kepada

Yth. Direktur Utama
PT. .....3)
.....4)

di

..... 5)

1. Menunjuk surat Saudara No. .....6) tanggal .....7) perihal permohonan Surat Izin Perusahaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPER).

2. Sehubungan butir 1 (satu) diatas, bersama ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Saudara telah diterima dan untuk proses selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ..... yaitu:

   a. ..... 8)
   b. .....

3. Permohonan Saudara dapat diproses lebih lanjut apabila kelengkapan dimaksud segera dipenuhi.

4. Demikian disampaikan untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

..... 9)
.....10)

Tembusan :
1. Dirjen Hubla;
2. DPP Pelra.

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 58

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan nomor ditandatanganinya surat penundaan izin usaha
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat penundaan izin usaha
3)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon izin usaha
4)	Diisi dengan alamat perusahaan pemohon izin usaha
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan pemohon izin usaha
6)	Diisi dengan nomor permohonan perusahaan pemohon izin usaha
7)	Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohon izin usaha
8)	Diisi dengan kekurangan persyaratan yang harus dilampirkan perusahaan pemohon izin usaha
9)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
10)	Diisi dengan pangkat/golongan/Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani

www.peraturan.go.id

Contoh 59

PEMERINTAH PROVINSI ...../KABUPATEN...../KOTAMADYA...
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. .....

SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN-RAKYAT (SIUPER)

(Berdasarkan PP.20 Tahun 2010 Jo PP.22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan dan Permenhub No.PM 93 Tahun 2013 JO. PM.....Tahun..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut)

NOMOR : ..... 1)

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor .....2) tanggal.....3) diberikan Surat Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPER) kepada :

Nama Perusahaan	: .....4)
Alamat Kantor Perusahaan	: .....5)
Nama Direktur Utama / Penanggung Jawab	: .....6)
Alamat Direktur Utama / Penanggung Jawab	: .....7)
Nomor Pokok Wajib Pajak	: .....8)
Nilai Modal Perusahaan	: .....9)

Kewajiban Pemegang SIUPER :
1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan dan perlindungan lingkungan maritim.
2. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Pemberi Izin.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Pemberi Izin setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi / Komisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.
4. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUPER ini.
5. Mengumumkan jadual baik untuk pelayaran tetap dan teratur atau liner maupun pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur atau tramper melalui media massa ataupun organisasi yang mempertemukan kepentingan pengguna dan penyedia jasa angkutan laut.
6. Menyampaikan laporan tahunan perusahaan kepada Pemberi Izin.
7. Menyampaikan laporan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Pemberi Izin.
8. Menyampaikan laporan kinerja keuangan perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Pemberi Izin.

SIUPER ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin usaha secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Dikeluarkan di : .....10)
Pada Tanggal : .....11)

Penanggung Jawab

..... 14)
..... 15)

PEMERINTAH PROVINSI .....

..... 12)
..... 13)

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 59

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan nomor surat izin usaha
2)	Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan pemohon izin usaha
3)	Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohon izin usaha
4)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon izin usaha
5)	Diisi dengan alamat domisili kantor perusahaan pemohon izin usaha
6)	Diisi dengan nama Direktur Utama (penanggung jawab) perusahaan pemohon izin usaha
7)	Diisi dengan alamat Direktur Utama penanggung jawab perusahaan pemohon izin usaha
8)	Diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan pemohon izin usaha
9)	Diisi dengan nilai modal dasar perusahaan pemohon izin usaha
10)	Diisi dengan nama tempat/kota surat izin usaha dikeluarkan
11)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat izin usaha
12)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
13)	Diisi dengan pangkat/golongan/Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
14)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan
15)	Diisi dengan jabatan penanggung jawab perusahaan

www.peraturan.go.id

Contoh 60

LAPORAN KEDATANGAN KAPAL

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) Pelra

.....1), ...2)

Kepada
Yth. ..... 3)
Jl. ..... 4)

di

.....5)

Menunjuk Permenhub No. PM..... , dengan ini diberitahukan bahwa akan tiba dipelabuhan ..... Kapal Pelayaran Rakyat Milik/*Charter* /Keagenan *) sebagai berikut :

1. Nama Kapal / Voyage : .....6)
2. DWT / GT :.....7)
3. Draft : .....8)
4. LOA : .....9)
5. Pemilik / Principle : .....10)
6. Nama Agen : .....11)
7. Nama Nakhoda : .....12)
8. Trayek : Tetap dan Teratur / Tidak Tetap dan Tidak Teratur *)
9. Jenis Pelayaran : SIUPAL / SIOPSUS / SIUPER *)
10. ETA / ETD : .....13)
11. Pelabuhan Asal / Tujuan : Dari ..... Tujuan .....14)
12. Posisi Kapal Sekarang : .....15)
13. Tambat / Labuh yang diminta : Sesuai dengan kondisi masing-masing Pelabuhan *)
14. Jenis barang yang akan di :
    a. Bongkar : .....16)
    b. Muat : .....17)
15. Rencana Kerja Bongkar Muat : .....18)
17. Jenis Barang (sesuai manifest) : .....19)

Uraian		Bongkar		Muat	
a.	General Cargo (brg. Campuran)	.....	T/M3	.....	T/M3
b.	Bag. Cargo (brg. Karungan)	.....	T/M3	.....	T/M3
c.	Bulk Cargo (brg curah)	.....	T/M3	.....	T/M3
d.	Barang berbahaya	.....	T/M3	.....	T/M3
e.	Lain-lain	.....	T/M3	.....	T/M3
	Jumlah	.....	T/M3	.....	T/M3
	Penumpang Naik/Turun	.....	Org	.....	Org
	Hewan turun	.....	Ekor	.....	Ekor

Diisi .....20) No. ...../...../...../Lala/.....

Mengetahui,

A.N .....21)

.....22)

Perusahaan Pelayaran

.....23)
Pimpinan

Tembusan :
1. Kabid Lala & Kepelab;
2. Kabid Gamat.....
3. Pelindo setempat
4. PPSA

*) Coret yang tidak perlu

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 60

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili kantor perusahaan angkutan laut nasional
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan nama kepala OP/KSOP/UPP/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie Lala
4)	Diisi dengan alamat kantor OP/Syahbandar/UPP/ Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie Lala
5)	Diisi dengan nama kota kantor OP/syahbandar/UPP/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie Lala
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
8)	Diisi dengan draft maksimal kapal
9)	Diisi dengan panjang kapal
10)	Diisi dengan nama pemilik/principle kapal
11)	Diisi dengan nama agen
12)	Diisi dengan nama nahkoda
13)	Diisi dengan perkiraan waktu kedatangan kapal di pelabuhan asal dan waktu keberangkatan ke pelabuhan tujuan
14)	Diisi dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan
15)	Diisi denganposisi kapal labuh dengan mencantumkan titik koordinat
16)	Diisi dengannama PBM yang ditunjuk dalam pelaksanaan bongkar muat
17)	Diisi denganrencana kerja bongkar muat
18)	Diisi dengan data yang sesuai dengan daftar di manifest
19)	Diisi dengan OP/Syahbandar/KSOP/UPP/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie Lala
20)	Diisi dengan nomor surat UPT yang bersangkutan
21)	Diisi dengan nama jabatan pejabat UPT yang bersangkutan
22)	Diisi dengan nama pejabat UPT yang bersangkutan
23)	Diisi dengan nama pimpinan perusahaan

www.peraturan.go.id

Contoh 61

LAPORAN BULANAN KEGIATAN KUNJUNGAN KAPAL PELRA

DI PELABUHAN .....

PT. PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT (PUSAT/CABANG)*)

JALAN : .....
TELEPON : .....

BULAN : .....

NO	NAMA KAPAL	DATANG		BONGKAR TON/M3	JENIS BARANG	BERANGKAT		MUAT TON/M3	JENIS BARANG	STATUS TRAYEK(*)	STATUS KAPAL(M/C/K) *)
		TGL	DARI PELAB.			TGL	KE PELAB.				

*) Coret yang tidak perlu

..... tanggal .....

PT. PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT PELRA

Keterangan :
L : Liner
T : Tramper
M : Milik

.....
Penanggung jawab

Contoh 62

LAPORAN REALISASI PERJALANAN KAPAL (*VOYAGE REPORT*)

Nama Perusahaan Pelayaran/Non Pelayaran *) : PT.
Alamat Perusahaan :
Telepon :
Periode Laporan :
Status Tryek : Liner/Tramper *)

Nama Kapal :
Bendera /Status Kapal :
Type/Ukuran Kapal :
Kecepatan Ekonomis :

Pelabuhan Asal	Tiba		Berangkat		Jarak Mil	Waktu Berlayar		Waktu Berlabuh		Bongkar Muat		Waktu Yang di Perlukan	Pelabuhan Tujuan	Pemuatan/Pemberangkatan						
	Tgl	Jam	Tgl	Jam		Hari	Jam	Hari	Jam	Mulai	Selesai			B/M	Ton 1000 Kg	Ukuran (M3)	Penum-pang	Hewan	Jenis Barang	Kemasan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

CATATAN :
Keterlambatan handling oleh karena muatan, menunggu tongkang/truck, kerusakan kapal dsd.
Diperlukan : ..... karena .....
Dilaut (karena cuaca, kerusakan mesin dsb) .....

..... , ...20 ...

PT. .....

(.....)

www.peraturan.go.id

I. DAFTAR JENIS MUATAN

1.	Beras	17.	Minyak Goreng	32.	Barang Kerajinan	48.	Kaolin	64.	Ikan Asia
2.	Gula Pasir	18.	Sayur-sayuran	33.	Soda ash	49.	Nikel	65.	Rumput Laut
3.	Gandum	19.	Buah-buahan	34.	Zat asam	50.	Alumunium	66.	Hasil Laut Lainnya
4.	Tepung Terigu	20.	Kapas	35.	Mesin-mesin	51.	Batubara	67.	Sapi
5.	Kedelai	21.	Hasil Pertanian dan	36.	Makanan Ternak	52.	Pasir Kwarsa	68.	Kerbau
6.	Kacang-kacangan		Perkebunan lainnya	37.	Baja/Besi Beton	53.	Pasir Besi	69.	Kulit Hewan
7.	Lada	22.	Pupuk	38.	Kertas	54.	Pasir Lain	70.	Kulit TernakLainnya
8.	Cengkeh	23.	Semen	39.	Makanan/Minuman	55.	Klinker		Penumpang Umum
9.	Rempah-rempah	24.	Garmen	40.	Hasil Perindustrian lainnya	56.	Hasil Pertambangan	71.	Transmigrasi
10.	Kopi	25.	Tekstil	41.	Crude Oil	57.	Logos	72.	Turis
11.	Tembakau	26.	Elektronik	42.	Bahan Bakar Minyak	58.	Kayu Gergaji	73.	TKI
12.	Kakao	27.	Gaplek	43.	Gas/LNG	59.	Kayu Lapis	74.	Lain-lain
13.	Teh	28.	Kedaraan	44.	Aspal	60.	Rotan		
14.	Karet	29.	Furniture	45.	Timah	61.	Hasil Hutan Lainnya		
15.	Kopra	30.	Garam	46.	Bauksit	62.	Ikan		
16.	Minyak Sawit	31.	Bahan Kimia	47.	Tembaga	63.	Udang		

III. DAFTAR JENIS KEMASAN

1. Bag. (pak/karung)	5. Drum	9. *Dry Bulk*
2. *Case* (Peti)	6. *Pallet*	10. *Liquid Bulk*
3. Bale (bal/bundal)	7. Peti kemas	11. lain-lain
4. Barel (Kaleng)	8. *Barge*	

III. DAFTAR TYPE KAPAL

1. Konvensional	5. Tongkang	9. *Bulk* (curah)	13.Kapal Layar (1)
2. *Container* (Petikemas)	6. Roro	10. Tanker	14.Kapal layar Motor (1)
3. Semi *Container* (Petikemas)	7. Tunda	11. *Lash*	15.Kapal Motor (1)
4. *Landing Craft*	8. Penumpang	12. Ikan	16.Lain-lain

www.peraturan.go.id

Contoh 63

LAPORAN TAHUNAN TAHUN .....

Nomor : ..... 1),..... 2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Tahunan Tahun ..... 3)

Kepada

Yth. Gubernur Provinsi/Bupati/Walikota

di

.....

1. Sesuai ketentuan Pasal.....Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun .....

2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan Laporan Tahunan untuk tahun ....., terlampir disampaikan Data Umum Perusahaan.

3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 4)

.....5)
..... 6)

Tembusan :
Ketua DPP INSA

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 63

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan domisili perusahaan
2)	Diisi dengan tanggal dibuatnya laporan
3)	Diisi dengan tahun yang akan dilaporkan
4)	Diisi dengan nama perusahaan
5)	Diisi dengan nama pimpinan perusahaan
6)	Diisi dengan nama jabatan pimpinan perusahaan

www.peraturan.go.id

Contoh 64

DATA UMUM PERUSAHAAN
Posisi : 31 Desember 20 ....

1. Nama perusahaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPER) :.....1)

2. Akte Pendirian Perusahaan Nomor :.....2)
   Notaris : .....3)
   Nomor dan tanggal : .....4)

3. Nomor dan tanggal SIUPER :.....5)

4. Alamat perusahaan :.....6)
   Nomor telepon :.....7)
   Domisili :.....8)

5. Nama / DIRUT :.....9)
   Alamat Rumah :.....10)
   Nomor Telepon :.....11)

6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan :.....12)

7. Jumlah Tenaga Kerja :.....13) Orang
   a. Darat :
      - Pusat :.....14) Orang
      - Cabang :.....15) Orang
   b. Laut :.....16) Orang

8. Jumlah Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat :.....17) Buah
   Alamat kantor cabang terlampir

9. Keangotaan INSA (Nomor- Tanggal) :.....18)

10. Jumlah kapal yang dimiliki :.....19) Unit
    Jumlah Taruna/Siswa Praktek PRODA/PKL *) :.....20) Orang
    Jumlah kapal yang dioperasikan :.....21) Unit

..... 20 ..... 22)

DIREKTUR UTAMA
PT. .....

(.....23))

*) Bagi kapal yang berukuran diatas GT. 750

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 64

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan nama perusahaan
2)	Diisi dengan nomo akte pendirian perusahaan
3)	Diisi dengan nama notaries pada akte pendirian perusahaan
4)	Diisi dengan nomor dan tanggal akte pendirian perusahaan
5)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPER
6)	Diisi dengan alamat perusahaan
7)	Diisi dengan nomor telepon perusahaan
8)	Diisi dengan domisili perusahaan
9)	Diisi dengan nama Dirut perusahaan
10)	Diisi dengan alamat rumah Dirut perusahaan
11)	Diisi dengan nomor telepon rumah
12)	Diisi dengan NPWP perusahaan
13)	Diisi dengan jumlah tenaga kerja
14)	Diisi dengan jumlah tenaga kerja di pusat
15)	Diisi dengan jumlah tenaga kerja di cabang
16)	Diisi dengan jumlah tenaga kerja di laut
17)	Diisi dengan jumlah cabang
18)	Diisi dengan nomor dan tanggal keanggotaan INSA
19)	Diisi dengan jum;ah kapal yang dimiliki
20)	Diisi dengan jumlah taruna/siswa praktek
21)	Diisi dengan jumlah kapal yang dioperasikan
22)	Diisi dengan tanggal surat
23)	Diisi dengan nama Dirut perusahaan

www.peraturan.go.id

Contoh 65

.....1)
.....2)

Nomor : ..... 3) ..... 4), ...5)
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS)

Kepada
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
di
JAKARTA

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ....., bersama ini kami mengajukan Permohonan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS).

2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :

   a. Akte Pendirian Perusahaan Pelayaran dari Notaris yang telah mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia;
   b. Bukti Kepemilikan 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut (*Grosse Akte*, Surat Ukur dan Sertifikat Keselamatan) yang masih berlaku;
   c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar dari Ditjen Pajak;
   d. Fotokopi Ijazah Tenaga Ahli Setingkat Diploma III di Bidang Pelayaran Niaga yang dilegalisir;
   e. Keterangan Domisili Perusahaan;
   f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan;
   g. Pakta Integritas;
   h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

3. Adapun rencana pengoperasian kapal yang kami miliki adalah dalam rangka Angkutan Laut.

4. Demikian permohonan kami, jika diterima, kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang Angkutan Laut.

Hormat kami,

PT. ..... 6)

..... 7)
..... 8)

Tembusan :
Menhub

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 65

NO	URAIAN
1)	Diisi dengan kop surat perusahaan dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte perusahaan yang telah disahkan oleh Kemenkumham
2)	Diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang sesuai dengan surat keterangan domisili perusahaan disertai dengan nomor telepon dan faksimilie
3)	Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan
4)	Diisi dengan nama kota tempat perusahaan berdomisili
5)	Diisi dengan tanggal surat permohonan perusahaan
6)	Diisi dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte perusahaan yang telah disahkan oleh Kemenkumham
7)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan
8)	Diisi dengan nama jabatan penanggung jawab perusahaan

www.peraturan.go.id

Contoh 65a

Nomor : ……1)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian Berkas Izin Operasi Angkutan Laut Khusus

Jakarta,……2)

Kepada

Yth. Direktur Utama
PT. .....3)
.....4)

di
.....5)

1. Menunjuk surat Saudara Nomor .....6) tanggal .....7) perihal Permohonan Surat Izin Operasi Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS).

2. Sehubungan butir 1 (satu) diatas, bersama ini diberitahukan bahwa surat permohonan saudara telah diterima dan untuk proses selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM …. Tahun …… yaitu:
   a. …… 8);
   b. ……

3. Permohonan Saudara dapat diproses lebih lanjut apabila kelengkapan dimaksud segera dipenuhi.

4. Demikian disampaikan untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

..... 9)
.....10)

Tembusan :
Dirjen Hubla

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 65a

NOMOR	URAIAN
1)	Diisi dengan nomor agenda surat keluar Kepala BKPM guna mengembalikan berkas permohonan Izin Operasi Angkutan Laut Khusus untuk dilengkapi oleh pemohon
2)	Diisi dengan tanggal dikeluarkannya surat Kepala BKPM
3)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon
4)	Diisi dengan alamat lengkap perusahaan pemohon
5)	Diisi dengan daerah/kota domisili perusahaan pemohon
6)	Diisi dengan Nomor surat permohonan Izin Operasi Angkutan Laut Khusus
7)	Diisi dengan tanggal surat permohonan Izin Operasi Angkutan Laut Khusus
8)	Diisi dengan alasan dikembalikan berkas permohonan SIOPSUS
9)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
10)	Diisi dengan pangkat/golongan pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangan

www.peraturan.go.id

Contoh 66

Nomor : .....1)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Izin Usaha Operasi Angkutan Laut Khusus

Jakarta,.....2)

Kepada

Yth. Kepala BKPM

di

JAKARTA

1. Memperhatikan surat PT. .....3) perihal Permohonan Izin Usaha Angkutan Laut Khusus, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di BKPM, bersama ini kami sampaikan bahwa telah dilakukan evaluasi pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis dengan hasil sebagai berikut :

   a. Kepemilikan Modal usaha telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi;

   b. Telah dilaksanakan pemeriksaan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis pada tanggal .....4) bertempat di .....5) yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana terlampir.

2. Dengan telah terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana ketentuaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ....., dapat direkomendasikan kepada PT. .....3) untuk penerbitan Izin Usaha Operasi Angkutan Laut Khusus.

3. Demikian disampaikan untuk proses lanjut, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT,

.....6)
.....7)
.....8)

Tembusan:

1. Direktur Utama PT. .....3)
2. .....

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 66

NOMOR	URAIAN
1)	Diisi dengan nomor agenda surat yang diterbitkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut
2)	Diisi dengan tanggal surat yang diterbitkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut
3)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon SIOPSUS
4)	Diisi dengan tanggal telah dilaksanakan pemeriksaan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
5)	Diisi dengan tempat dilakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis
6)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani/Direktur Jenderal Perhubungan Laut
7)	Diisi dengan pangkat/golongan pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
8)	Diisi dengan NIP pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani

www.peraturan.go.id

Contoh 67

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110

SURAT IZIN OPERASI PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT KHUSUS (SIOPSUS)
(Berdasarkan PP No.20 Tahun 2010 jo. PP No. 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan dan Permenhub No. PM 93 Tahun 2013 jo Permenhub No. PM.. Tahun...tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan laut)

NOMOR : ..... 1)

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor. .....2) tanggal .....3), diberikan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) kepada :

Nama Perusahaan	: .....4)
Bidang Usaha Pokok	: .....5)
Alamat Kantor Perusahaan	: .....6)
Nama Direktur Utama/Penanggung Jawab	: .....7)
Alamat Direktur Utama/Penanggung Jawab	: .....8)
Nomor Pokok Wajib Pajak	: .....9)
Nilai Modal Perusahaan	: .....10)
Status Perusahaan	: .....11)

Kewajiban Pemegang SIOPSUS :
1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan dan perlindungan lingkungan maritim;
2. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
3. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi/omisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal;
4. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIOPSUS ini;
5. Menyampaikan laporan tahunan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
6. Menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna/calon perwira yang akan melaksanakan praktek berlayar (Proyek Laut), bagi kapal yang berukuran GT. 750 keatas; dan
7. Menyediakan ruangan untuk angkutan pos.

SIOPSUS ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin operasi secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Izin Operasi ini berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : ..... 12)

Penanggung Jawab

..... 15)
..... 16)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

..... 13)
..... 14)

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 67

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan nomor ditandatanganinya surat izin operasi
2)	Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan pemohon izin operasi
3)	Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohon izin operasi
4)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon izin operasi
5)	Diisi dengan usaha pokok perusahaan pemohon izin operasi
6)	Diisi dengan alamat domisili kantor perusahaan pemohon izin operasi
7)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan pemohon izin operasi
8)	Diisi dengan alamat penanggung jawab perusahaan pemohon izin operasi
9)	Diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan pemohon izin operasi
10)	Diisi dengan nilai modal dasar perusahaan pemohon izin operasi
11)	Diisi dengan status perusahaan pemohon izin usaha (PMDN/PMA)
12)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat izin operasi
13)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
14)	Diisi dengan pangkat/golongan/Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
15)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan pemohon izin operasi
16)	Diisi dengan jabatan penanggung jawab perusahaan pemohon izin operasi

www.peraturan.go.id

Contoh 68

Nomor : .....1)., ...2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pembukaan Kantor Cabang di Pelabuhan ……..3)

Kepada
Yth. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

di

JAKARTA

Dengan Hormat,

1. Bersama ini kami beritahukan pada Bapak bahwa Perusahaan kami PT. ……..4) terhitung mulai tanggal ……..5) akan membuka Kantor Cabang di Pelabuhan ……..3), dengan data sebagai berikut :

   a. Nama Perusahaan : .....6)
   b. No & Tgl : .....7)
   c. N.P.W.P perusahaan : ....8)
   d. Nama Kepala Cabang : .....9)
   e. Alamat kantor Cabang : .....10)
   f. Status Kantor : .....11)

2. Sebagai bahan pertimbangan bapak, terlapir bersama ini kami sampaikan :

   a. Fotokopi SIUPAL/SIUPER;
   b. SK Pengangkatan Kepala Cabang;
   c. Bukti kunjungan kapal milik dan kapal *charter* yang dilegalisir oleh Penyelenggara Pelabuhan.

3. Pembukaan kantor cabang ini kami maksudkan untuk melayani kunjungan kapal (milik/sewa) yang kami operasikan sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun .....

4. Kami akan memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.

5. Demikian disaampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami ,
PT……..4)

(.....12)

Tembusan Yth :
1. Gubernur.....13);
2. Bupati/Walikota .....14);
3. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan/KSOP/KUPP/Kepala Kantor Pelabuhan .....15);

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 68

NO	URAIAN
1)	Diisi dengan kota domisili perusahaan
2)	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan pembukaan kantor cabang
3)	Diisi dengan nama pelabuhan terdekat dimana tempat pembukaan kantor cabang perusahaan
4)	Diisi dengan nama perusahaan kantor pusat
5)	Diisi dengan tanggal pembukaan kantor cabang
6)	Diisi dengan nama perusahaan kantor pusat
7)	Diisi dengan Nomor dan tanggal akte pendirian perusahaan
8)	Diisi dengan Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)Perusahaan
9)	Diisi dengan nama kepala cabang
10)	Diisi dengan alamat kantor cabang sesuai domisili
11)	Diisi dengan status kantor (milik/sewa)
12)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan
13)	Diisi dengan nama provisi setempat
14)	Diisi dengan nama kabupaten/kota setempat
15)	Diisi dengan nama penyelenggara pelabuhan setempat

www.peraturan.go.id

Contoh 69

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Pembukaan
Kantor Cabang di Pelabuhan ……..1)

Kepada Yth.
Gubernur.....

di
……

Dengan Hormat,

1. Bersama ini kami beritahukan kepada Bapak bahwa Perusahaan kami PT. ……2) terhitung mulai tanggal …….3) Akan membuka kantor Cabang di Pelabuhan ……..4) dengan data sebagai berikut :

   a. Nama Perusahaan : .....5)
   b. No. & Tgl : .....6)
   c. N.P.W.P Perusahaan : .....7)
   d. Nama Kepala Cabang : .....8)
   e. Alamt kantor Cabang : .....9)
   f. Status Kantor : .....10)

2. Sebagai bahan pertimbangan bapak, bersama ini terlampir kami sampaikan :

   a. Salinan SIUPER;
   b. SK Pengangkatan Kepala Cabang;
   d. Bukti kunjungan kapal milik dan kapal *charter* yang dilegalisir oleh kepala Kantor penyelenggara pelabuhan.

3. Pembukaan kantor cabang ini kami maksudkan untuk melayani kunjungan kapal (milik/sewa) yang kami operasikan sesuai diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ….. Tahun …… .

4. Kami akan memenuhi seluruh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Angkutan di Perairan Kepelabuhan, Keselamatan dan Keamanan serta Perlindungan Lingkungan Maritim.

5. Demikian disaampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami ,
PT……..5)
Penanggung Jawab

(.....11)

Tembusan Yth :
1. Dirjen Hubla;
2. Gubernur setempat;
3. Kantor Otoritas Pelabuhan setempat;
4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan OP setempat;
5. Kepala Kantor UPP setempat.

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 69

NOMOR	URAIAN
1)	Diisi nama pelabuhan cabang
2)	Diisi nama perusahaan kantor pusat
3)	Diisi tanggal permohonan pembukaan kantor cabang
4)	Diisi nama pelabuhan cabang
5)	Diisi nama perusahaan kantor pusat
6)	Diisi Nomor dan tanggal permohonan
7)	Diisi Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)Perusahaan
8)	Diisi nama kepala cabang
9)	Diisi alamat kantor cabang sesuai domisili
10)	Diisi dengan status kantor (milik/sewa)
11)	Diisi nama penanggung jawab perusahaan

www.peraturan.go.id

Contoh 70

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Pembukaan
Kantor Cabang di Pelabuhan ……..1)

Kepada Yth.
Bupati/Walikota .....

di

……

Dengan Hormat,

1. Bersama ini kami beritahukan kepada Bapak bahwa Perusahaan kami PT. ……2) terhitung mulai tanggal …….3) Akan membuka kantor Cabang di Pelabuhan ……..4) Dengan data sebagai berikut :

   a. Nama Perusahaan : .....5)
   b. No & Tgl : .....6)
   c. N.P.W.P Perusahaan : .....7)
   d. Nama Kepala Cabang : .....8)
   e. Alamt kantor Cabang : .....9)
   f. Status Kantor : .....10)

2. Sebagai bahan pertimbangan bapak, terlapir bersama ini kami sampaikan :
   a. Salinan SIUPER;
   b. SK Pengangkatan Kepala Cabang;
   e. Bukti Kunjungan kapal milik dan kapal charter yang dilegalisir oleh Penyelenggara Pelabuhan.

3. Pembukaan kantor cabang ini kami maksudkan untuk melayani kunjungan kapal (milik/sewa) yang kami operasikan sesuai diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM …. Tahun …….

4. Kami akan memenuhi seluruh Ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dibidang Angkutan di Perairan Kepelabuhan, Keselamatan dan Keamanan serta Perlindungan Lingkungan Maritim.

5. Demikian disaampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami ,
PT ……

(.....11)

Tembusan Yth :
1. Dirjen Hubla;
2. Gubernur setempat;
3. Kantor Otoritas Pelabuhan setempat;
4. Kepala kantor Administrator setempat;
5. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 70

NOMOR	URAIAN
1)	Diisi nama pelabuhan cabang
2)	Diisi nama perusahaan kantor pusat
3)	Diisi tanggal permohonan pembukaan kantor cabang
4)	Diisi nama pelabuhan cabang
5)	Diisi nama perusahaan kantor pusat
6)	Diisi Nomor dan tanggal permohonan
7)	Diisi Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)Perusahaan
8)	Diisi nama kepala cabang
9)	Diisi alamat kantor cabang sesuai domisili
10)	Diisi dengan status kantor (milik/sewa)
11)	Diisi nama penanggung jawab perusahaan

www.peraturan.go.id

Contoh 71

Nomor : ……..1)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut di Pelabuhan ……3)

Jakarta,……..2)

Kepada

Yth. Direksi
PT. ……..4)
……..5)

di

……6)

1. Menunjuk surat Saudara No. ……7) tanggal ……8) perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan sesuai Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM …. Tahun ……, dengan ini dinyatakan bahwa kantor cabang dari PT. ……9) selaku pemegang SIUPAL No.BX-……10) /AL.001 tanggal……. 11) di :

   a. Pelabuhan : …… 12)
   b. Alamat : …….. 13)
   c. Telepon / Fax : ……14) / ……. 15)
   d. Nama Penanggung Jawab / Kepala Cabang : ……. 16)
   e. Alamat Kepala Cabang : ……. 17)
   f. Nomor/Tanggal SK. Pengangkatan Kepala Cabang : …….. 18) tanggal ……19)

2. Kantor cabang tersebut telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kantor Cabang, adalah sebagai berikut :

   a. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, perlindungan lingkungan maritim serta ketentuan peraturan pemerintah daerah setempat.
   b. Kantor cabang harus merupakan bagian organik dari induk perusahaan yang bersangkutan.
   c. Kantor cabang bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional perusahaan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Administrator Pelabuhan setempat.
   d. Setiap kali terjadi perubahan kepala cabang, alamat kantor cabang dan perubahan-perubahan lainnya, perusahaan induk harus melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
   e. Perusahaan induk secara financial bertanggung jawab sepenuhnya atas hutang yang dilakukan oleh kantor cabang.
   f. Kantor cabang ditutup dengan sendirinya bilamana perusahaan induk yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan lagi dan atau tidak ada kunjungan kapal milik / charter selama 6 (enam) bulan berturut - turut.

3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

……. 23)
…….. 24)

Tembusan :
1. Dirjen Hubla;
2. Sesditjen Hubla;
3. Kadis Perhubungan Provinsi …… 20);
4. Kepala Kantor Administrator Pelabuhan ……21);;
5. Ketua DPP INSA;
6. Ketua DPC INSA. ……22).

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 71

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan nomor pemberitahuan pembukaan kantor cabang
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya pemberitahuan pembukaan kantor cabang
3)	Diisi dengan nama pelabuhan tempat dibukanya kantor cabang
4)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional
5)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional
6)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional
7)	Diisi dengan nomor permohonan pembukaan kantor cabang
8)	Diisi dengan tanggal permohonan pembukaan kantor cabang
9)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional
10)	Diisi dengan nomor Surat Izin Usaha
11)	Diisi dengan tanggal Surat Izin Usaha
12)	Diisi dengan nama pelabuhan tempat dibukanya kantor cabang
13)	Diisi dengan alamat kantor cabang
14)	Diisi dengan nomor telepon kantor cabang
15)	Diisi dengan nomor faksimile kantor cabang
16)	Diisi dengan nama kepala kantor cabang
17)	Diisi dengan alamat kepala kantor cabang
18)	Diisi dengan nomor surat keputusan pengangkatan kepala kantor cabang
19)	Diisi dengan tanggal surat keputusan pengangkatan kepala kantor cabang
20)	Diisi dengan nama provinsi tempat dibukanya kantor cabang
21)	Diisi dengan nama Kantor Otoritas Pelabuhan/Kantor KSOP /Kantor Pelabuhan/Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan tempat dibukanya kantor cabang
22)	Diisi dengan nama provinsi tempat dibukanya kantor cabang
23)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
24)	Diisi dengan pangkat/golongan/Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani

www.peraturan.go.id

Contoh 72

.....1)

.....2)

Nomor : ..... 3) ..... 4), ...5)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Spesifikasi Kapal

Kepada

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Cq.Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Jl. Medan Merdeka Barat No.8

di

JAKARTA

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ....., bersama ini kami mengajukan Permohonan Spesifikasi Kapal.

2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :

   a. Surat permohonan;
   b. Salinan Grosse Akte;
   c. Salinan Surat Ukur yang masih berlaku;
   d. Sertifikat Keselamatan Konstruksi yang masih berlaku;
   e. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan yang masih berlaku;
   f. Ship particular yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan;
   g. Sertifikat Klas.

3. Adapun rencana pengoperasian kapal yang kami miliki adalah dalam rangka Angkutan Laut.

4. Demikian permohonan kami, jika diterima, kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang Angkutan Laut.

Hormat kami,

PT. ..... 6)

..... 7)
..... 8)

Tembusan :
Dirjen Hubla

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 72

NO	URAIAN
1)	Diisi dengan kop surat perusahaan dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte perusahaan yang telah disahkan oleh Kemenkumham
2)	Diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang sesuai dengan surat keterangan domisili perusahaan disertai dengan nomor telepon dan faksimilie
3)	Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan
4)	Diisi dengan nama kota tempat perusahaan berdomisili
5)	Diisi dengan tanggal surat permohonan perusahaan
6)	Diisi dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte perusahaan yang telah disahkan oleh Kemenkumham
7)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan
8)	Diisi dengan nama jabatan penanggung jawab perusahaan

www.peraturan.go.id

Contoh 73

Lampiran : Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL/SIOPSUS/SIUPER)
Nomor : B.X - ……. 1) /AL.001
Tanggal : ……..2) 5/26/2011

Nomor Spesifikasi Kapal : ……..3)

SPESIFIKASI KAPAL YANG DIMILIKI/DIOPERASIKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT
(SIUPAL/SIOPSUS/SIUPER)
PT. ……..4)

1. Nama Kapal : ……5)
2. Nomor Pendaftaran : ……6)
3. Grosse Akte Nomor : ……7) Tanggal ……..8)
4 Dikeluarkan oleh : ……9)
5. Tanda Selar : ……10)
6. Pemilik Kapal : …… ….11)
7. Nama Panggilan (*Call Sign*) : …… ….12)
7. Nama Galangan Pembuat Kapal/Tahun Pembangunan : ……13) / ……..14)
8. Bendera : ……. ……15) Konstruksi : ……16)
9. Dikelaskan pada : …… …..17) Code Klas : ……18)
   Daerah pelayaran : ……19)
10. *Type* : ……..20)
11. Ukuran Pokok :
    a. Panjang kapal seluruh (LOA) : ……21)
    b. Panjang antara garis tegak (LBP) : ……22)
    c. Lebar Kapal : ……23)
    d. Dalam (h) : ……24)
    e. Draft Kapal :
       1) Sarat musim panas (*Summer Draft*) : ……25)
       2) Sarat musim dingin (*Winter Draft*) : …… 26)
       3) Draft pada air tawar : ……27)
       4) Sarat Tropik (*Tropical Draft*) : ……28)
    f. Isi Kotor (GT) : ……29)
    g. Bobot Mati (DWT) : ……30)
    h. Kapasitas Angkut :
       1) Penumpang :……31)
       2) Mobil :……32)
       3) *Container* :……33)
       4) *Grain Space* :……34)
       5) *Bale Space* :……35)
12. Jumlah Awak Kapal (*Crew*) : ……36)
13. Jumlah Palka : …… 37)
14. Crane kapal (*Derrick*) :
    a. Jumlah : ……38)
    b. Kapasitas Angkat : ……39)
15. Mesin induk :
    a. Merk : ……40)
    b. Tahun : ……41)
    c. Nomor : ……42)

    Mesin Bantu :
    a. Merk : ……43)
    b. Tahun : ……44)
    c. Nomor : ……45)
16. Kecepatan / *Speed*:
    a. Maksimum : ……46)
    b. Normal : ……47)
    c. Ekonomis : ……48)
17. Bahan Bakar :
    a. Jenis bahan bakar yang digunakan : ……49)
    b. Kebutuhan bahan bakar per hari (dalam perjalanan) : ……50)

Jakarta, …… 51)

A.N. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Direktur Lalu Lintas Dan Angkutan Laut

……52)
…… 53)

www.peraturan.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 73

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan nomor Surat Izin Usaha (SIUPAL/SIOPSUS/SIUPER)
2)	Diisi dengan tanggal Surat Izin Usaha (SIUPAL/SIOPSUS/SIUPER)
3)	Diisi dengan nomor spesifikasi kapal
4)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional
5)	Diisi dengan nama kapal
6)	Diisi dengan nomor pendaftaran kapal
7)	Diisi dengan nomor *grosse* akte kapal
8)	Diisi dengan tanggal *grosse* akte kapal
9)	Diisi dengan tempat pendaftaran kapal
10)	Diisi dengan tanda selar kapal
11)	Diisi dengan nama pemilik kapal (WNI atau BHI atau Badan Usaha Patungan)
12)	Diisi dengan nama panggilan kapal
13)	Diisi dengan tempat pembuatan kapal
14)	Diisi dengan tahun pembuatan kapal
15)	Diisi dengan bendera kebangsaan kapal
16)	Diisi dengan konstruksi (baja/kayu/*fibreglass*)
17)	Diisi dengan badan klasifikasi tempat kapal diklaskan
18)	Diisi dengan kode lambung yang diberikan oleh badan klasifikasi
19)	Diisi dengan daerah pelayaran kapal yang diizinkan oleh instansi yang berwenang
20)	Diisi dengan tipe kapal
21)	Diisi dengan ukuran panjang keseluruhan kapal
22)	Diisi dengan ukuran panjang antara garis tegak kapal
23)	Diisi dengan ukuran lebar kapal
24)	Diisi dengan ukuran dari dasar kapal sampai dek utama kapal.
25)	Diisi dengan ukuran sarat kapal pada musim panas
26)	Diisi dengan ukuran sarat kapal pada musim dingin
27)	Diisi dengan ukuran sarat kapal pada air tawar
28)	Diisi dengan ukuran sarat kapal pada musim tropis
29)	Diisi dengan isi kotor kapal
30)	Diisi dengan bobot mati kapal
31)	Diisi dengan kapasitas muat untuk muatan penumpang dalam satuan orang
32)	Diisi dengan kapasitas muat untuk muatan mobil dalam satuan unit
33)	Diisi dengan kapasitas muat untuk muatan container dalam satuan teus
34)	Diisi dengan kapasitas muat untuk muatan curah dalam satuan cft
35)	Diisi dengan kapasitas muat untuk muatan umum (*general cargo*) dalam satuan cft
36)	Diisi dengan jumlah anak buah kapal (*crew)*
37)	Diisi dengan jumlah ruang palka dalam satuan unit
38)	Diisi dengan jumlah crane yang tersedia dalam satuan unit
39)	Diisi dengan kapasitas angkat crane dalam satuan ton
40)	Diisi dengan merk, jumlah dan *horse power* mesin induk kapal
41)	Diisi dengan tahun pembuatan mesin induk kapal
42)	Diisi dengan nomor seri mesin induk kapal
43)	Diisi dengan merk, jumlah dan *horse power* mesin bantu kapal
44)	Diisi dengan tahun pembuatan mesin bantu kapal
45)	Diisi dengan nomor seri mesin bantu kapal
46)	Diisi dengan kecepatan maksimum kapal dalam satuan knot

www.peraturan.go.id

47)	Diisi dengan kecepatan normal kapal dalam satuan knot
48)	Diisi dengan kecepatan ekonomis kapal dalam satuan knot
49)	Diisi dengan jenis bahan bakar yang digunakan oleh kapal (HSD/MFO/MDO)
50)	Diisi dengan kebutuhan bahan bakar per hari dalam satuan ton per hari
51)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya spesifikasi kapal
52)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
53)	Diisi dengan pangkat/golongan/Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

www.peraturan.go.id